

KONSTRUKSI

Media Informasi & Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Edisi 4 Tahun 2018



PEMERINTAH DORONG PENINGKATAN

TKDN SEKTOR KONSTRUKSI



BAKTI BAGI NEGERI,
PEMERINTAH CETAK TENAGA KERJA KONSTRUKSI
DARI WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN

PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL
UNTUK MENJADI COACH

3 | BERITA UTAMA

Bakti Bagi Negeri, Pemerintah Cetak Tenaga Kerja Konstruksi dari Warga Binaan Pemasyarakatan



BERITA UTAMA

- 6 | Pembangunan Infrastruktur Butuh Alternatif Pendanaan dan Mengedepankan Keselamatan
- 8 | Tingkatkan Pemahaman Kontrak Konstruksi, Kementerian PUPR Luncurkan Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi

BERITA TERKINI

- 10 | Peningkatan Kompetensi bagi Pelaksana Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat
- 12 | Manajemen Risiko Komprehensif dalam Proyek KPBU Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Persampahan
- 15 | *Public Sector Comparator* Sebagai Metode Penilaian *Value For Money* dalam Penentuan Pemilihan Skema Penyediaan Infrastruktur

LIPUTAN KHUSUS

- 18 | Potret Asesor untuk Mendukung Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
- 20 | Gagasan Perhitungan Data Supply Demand Tenaga Kerja Konstruksi
- 22 | Balai Material dan Peralatan Konstruksi Lakukan Percepatan Uji Sertifikasi Operator Alat Berat di Perbatasan Negara Kalimantan Utara

LAPORAN KHUSUS

- 24 | Pemerintah Dorong Peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Sektor Konstruksi
- 26 | Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Melalui Pola Kuliah Kerja Nyata Tematik Infrastruktur
- 28 | Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perlu Ketersediaan Sumber Daya Konstruksi yang Berkualitas
- 29 | Mengenal Lebih Dalam Hakikat Pelayanan Publik
- 31 | Pemberdayaan Pejabat Fungsional Untuk Menjadi Coach
- 33 | Gen dan Generasi DJBK

Salam Pembuka!

Semarak menyambut ulang tahun ke 73 Indonesia kian terasa dengan adanya perhelatan akbar se-ASIA, ASIAN GAMES 2018. Indonesia yang menjadi tuan rumah pun tengah berhias diri untuk mempercantik segala fasilitas olahraga, infrastruktur dan pendukung seperti pembangunan wisma atlet yang akan ditempati oleh atlet dan official team.

Masyarakat konstruksi juga tidak ketinggalan turut menyambut pesta besar rakyat di Benua Asia ini. Apalagi mengingat bangsa Indonesia menjadi tuan rumah, tentunya kita bangsa Indonesia harus turut menjaga 'rumah' kita agar bersih, rapi, aman, dan nyaman. Sarana dan prasarana yang merupakan produk konstruksi harus turut dirawat agar kita mampu berbangga diri menjadi salah satu Negara terdepan dalam Pembangunan Infrastruktur.

Dalam edisi ke empat tahun 2018 ini, Buletin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali hadir memberikan informasi terbaru secara mendalam seputar dunia konstruksi. Salah satunya, sebagai bakti bagi negeri, Pemerintah melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang telah dibina sebelumnya pada tahun 2012 dan berakhir 2017. Kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud upaya nyata arahan Presiden RI bahwa fokus Pemerintah adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ajang pesta masyarakat sektor konstruksi hadir kembali di tahun 2018 ini, Konstruksi Indonesia. Beberapa waktu lalu Kementerian PUPR mengadakan Lauching Konstruksi Indonesia 2018. Ajang ini mengundang berkumpulnya masyarakat jasa konstruksi pada 31 Oktober – 2 November 2018 mendatang di Jakarta International Expo Kemayoran. Simak juga ulasan hadirnya Klinik Konstruksi sebagai jawaban Kementerian PUPR atas berbagai masalah dalam Penyelenggaraan Konstruksi.

Tidak hanya fokus terhadap Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi juga meningkatkan kompetensi bagi pelaksanaan program Infrastruktur berbasis masyarakat. Hadir juga tulisan kreatif terkait gagasan perhitungan data *supply-demand* tenaga kerja konstruksi.

Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi juga terus mengupayakan peningkatan kandungan dalam negeri (TKDN) sektor konstruksi dan informasi layanan konsultasi kontrak konstruksi bisa menjadi bacaan alternatif pada edisi ini. Simak juga informasi tentang *Choaching and Mentoring* yang dilakukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PUPR, Pelayanan Publik serta Gen dan generasi DJBK menjadi bacaan ringan pada edisi kali ini.

Sebagaimana hadirnya ASIAN GAMES 2018 mengobarkan semangat segenap bangsa Indonesia untuk kompetitif dan professional di bidang masing-masing. Demikian pula di sektor konstruksi, saatnya kita meningkatkan kualitas dan berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur. Semangat DJBK, Bersama KITA Membangun... !

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi; Direktur Bina Investasi Infrastruktur; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan. **Pemimpin Umum:** Hambali. **Pemimpin Redaksi:** Kristinawati Pratiwi Hadi. **Penyunting / Editor:** Indri Eka Lestari, Mirza Ayu Anindita, Hari Mahardika. **Redaksi Sekretariat:** Thyoria Mariska Girsang, Agus Raharyo, Emy Zubir, Vita Puspitasari, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** M. Aldenny, Tri Berkah, Agus Firngadi. **Desain dan Tata Letak:** Dagu Komunika. **Fotografer:** Sri Bagus Herutomo.

KONSTRUKSI

Alamat Redaksi:

Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tlp/Fax : 021-72797847,
E-Mail : hukumdatakompu.djbk@gmail.com



BAKTI BAGI NEGERI, Pemerintah Cetak Tenaga Kerja Konstruksi dari Warga Binaan Permasyarakatan

Di awal tahun ini, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah fokus pada Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini kembali ditegaskan beliau saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (7/8). "Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia harus menjadi penekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," kata Presiden dalam arahannya.

Bahkan, lebih spesifik lagi, Kepala Negara mengharapkan agar setiap hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia segera dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2019. "Saya harapkan terutama untuk vocational school,

Selama masa tahanan, warga binaan yang telah mendapatkan sertifikat tetap diberikan ruang praktik yakni membangun prasarana-sarana yang ada di sekitar Lapas.

vocational training, politeknik, kemudian kemitraan dengan industri, kemudian upgrading di ketenagakerjaan kita, dan kementerian-kementerian yang lain," ujar Joko Widodo.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi yang bertugas melakukan pembinaan tenaga kerja konstruksi telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Jasa Konstruksi. Penandatanganan tersebut dilakukan Jumat (27/09) di Pulau Nusakambangan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Kerjasama ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang telah dibina sebelumnya pada tahun 2012 dan berakhir tahun 2017, yang telah berhasil melaksanakan pelatihan untuk peningkatan keterampilan sebanyak 4 angkatan narapidana di Bidang Konstruksi dan Pengelolaan Air Limbah serta Sampah.



Melalui kerjasama tersebut telah dibangun sarana pengolahan air limbah / sampah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dan Salemba.

Target kerjasama yang baru ini diperluas tidak hanya ditujukan untuk para warga binaan pemasyarakatan yakni para Narapidana (yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanan) dan Klien (yang mendapatkan bebas bersyarat), tetapi juga ditujukan untuk para petugas pemasyarakatan. Pada saat ini terdapat 173.367 orang warga binaan dan 44.252 klien yang tersebar di seluruh lapas di 34 provinsi di Indonesia.

“Melalui kerjasama ini diharapkan para warga binaan dapat meningkatkan kompetensinya di bidang jasa konstruksi, dan menjadi bekal mereka di masa mendatang sehingga kesejahteraan mereka terutama secara ekonomi semakin meningkat. Disinilah peran Pemerintah hadir melalui pemerataan pembangunan yang akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat”, ujar Basuki.

Sebagai langkah awal dari kerjasama ini, telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi kepada 132 warga binaan pemasyarakatan terdiri dari 32 warga binaan pemasyarakatan di Lapas Nusa Kambangan dan 100 orang warga binaan pemasyarakatan di Lapas Cipinang selama 4 hari mulai tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2018. Adapun warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pelatihan adalah warga binaan pemasyarakatan dari kejahatan umum yang telah menjalani 2/3 dari masa tahananannya



dan dinilai baik. Pada kesempatan ini Menteri PUPR dan Menteri Hukum dan HAM memberikan sertifikat keterampilan kelas 3 kepada 132 warga binaan pemasyarakatan tersebut yang telah diuji kompetensinya sebagai tukang batu, tukang kayu (*mebeleuir*) dan bangunan umum.

Selama masa tahanan, warga binaan yang telah mendapatkan sertifikat tetap diberikan ruang praktik yakni membangun prasarana-sarana yang ada di sekitar Lapas. Atau bagi mereka yang telah bebas bersyarat, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun fasos/fasum atau bekerja di badan usaha.

Pemberdayaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menjadi potensi tenaga kerja konstruksi dapat memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan

tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang saat ini baru berjumlah ± 470.789 orang. “Stigma masyarakat harus diubah, sebab kualitas tenaga kerja mantan narapidana ini tidak kalah dengan pekerja lainnya. Mantan narapidana juga menyimpan potensi yang dapat digali dan diarahkan menuju hal-hal positif, termasuk dalam bidang konstruksi”, ujar Basuki Hadimuljono.

Melalui program ini, yang bukan hanya untuk memenuhi kewajiban dari UU Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 tentang kewajiban tenaga kerja konstruksi bersertifikat, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para warga binaan pada saat mereka kembali kepada lingkungan sosialnya. Melalui sertifikasi akan ada jaminan kejelasan upah bagi tenaga kerja dan memberikan perlindungan

hukum serta meningkatkan kesejahteraan warga binaan.

Seluruh warga binaan yang telah tersertifikasi sebagai tenaga kerja konstruksi ini akan tercatat dalam sistem database Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan akan menjadi sumber informasi bagi seluruh badan usaha jasa konstruksi yang memerlukan tenaga terampil untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja setidak-tidaknya pada proyek konstruksi pada wilayah terdekat dengan domisilinya.

Dalam kunjungan kerja ini, Menteri PUPR dan Menteri Hukum dan HAM melakukan kunjungan dan peninjauan pembangunan rumah khusus (rusus) dan rumah susun bagi petugas Lapas di Nusa Kambangan yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2018. Rumah susun yang dibangun sebanyak 2 tower, terdiri dari 3 lantai untuk type 36 dan 4 lantai untuk type 24 yang mampu menampung 92 KK, sedangkan untuk rumah khusus dibangun sebanyak 28 unit untuk type 36. Sejalan dengan amanat UU No.2 tahun 2017, maka kepada para pekerja yang membangun rusun dan rusus ini juga dilakukan sertifikasi tenaga kerja terampil kelas 3, dengan menggunakan pola uji langsung (*on site*) kepada lebih kurang 200 tenaga kerja.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 500 pegawai Lapas Nusa Kambangan, namun karena fasilitas yang terbatas maka sebagian besar pegawai tinggal di Kota Cilacap.



"Saya sudah melihat apa yg dibangun di Bali (Rusun-red). Kualitasnya cukup bagus, seperti apartemen yang dibangun oleh swasta. Untuk itu kami berterimakasih kepada Menteri PUPR. Ini sangat membantu Kemenkumham" tambah Menteri Yasonna.

"Hari ini hari istimewa, karena Pemer-

intah menunjukkan kerjasama yang baik, dan tidak hanya membangun secara fisik saja, tapi lebih dari itu membangun harapan bagi warga binaan yang juga warga Negara Indonesia yang berhak mendapat penghidupan yang layak." tutup Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.*





Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat



KONSTRUKSI
INDONESIA

31 Oktober - 2 Nopember 2018
Jakarta International Expo, Jakarta, Indonesia



Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi

PELUNCURAN ACARA KONSTRUKSI INDONESIA 2018

RABU, 18 JULI 2018 | RUANG AUDITORIUM KEMENTERIAN PUPR

PENYIFAATAN PELUANG BISNIS KONSTRUKSI DI INDONESIA



Pembangunan Infrastruktur Butuh Alternatif Pendanaan dan Mengedepankan Keselamatan

Pembangunan Infrastruktur menjadi fokus utama Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing global, dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Hal ini menjadi pilihan logis dan strategis melihat data *Global Competitiveness Index*, dimana Indeks Daya Saing Global Indonesia meningkat dari peringkat 41 di tahun 2017 menjadi peringkat 36 di tahun 2018. Demikian juga Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia yang meningkat dari peringkat 60 di tahun 2017 menjadi peringkat ke 52 di tahun 2018. Sedangkan Survei Gallup World Poll juga menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara yang Pemerintahannya paling di percaya oleh masyarakat.

"Tentunya untuk bisa mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas kita butuh dukungan dari stakeholders sektor konstruksi. Dukungan tersebut berupa pendanaan, tenaga kerja konstruksi bersertifikat, inovasi teknologi, peningkatan

mutu konstruksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, dan lain sebagainya", demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, yang mewakili Menteri PUPR saat membuka Launching Konstruksi Indonesia (KI) 2018, Rabu (18/7) di Jakarta.

Terkait K3 Konstruksi, Anita menekankan bahwa terjadinya beberapa kecelakaan kerja maupun kegagalan bangunan beberapa waktu lalu jangan sampai terjadi lagi di masa mendatang. Mengingat hal itu dapat menghambat berjalannya Pembangunan Infrastruktur, yang pada akhirnya merugikan semua pihak, baik kerugian waktu dan pengeluaran dari pelaksana, kerugian dari sisi pekerja karena luka-luka atau meninggal, dan tentunya masyarakat karena sejalannya Pembangunan Infrastruktur ditujukan untuk rakyat.

"Kuncinya adalah disiplin pada prinsip K3 dan patuh pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, agar tercapai *Zero Accident*", ungkap Sekjen PUPR.

Selain K3, faktor pendukung lain yaitu pendanaan juga memerlukan sumber-sumber pembiayaan alternatif, tidak hanya dari Pemerintah. Sebagai gambaran, di tahun 2018 Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp 107,386 Triliun atau hanya 12,67% dari total APBN. Sedangkan mengenai tenaga kerja, Anita mengingatkan bahwa Pembangunan Infrastruktur yang massif memerlukan tidak hanya tenaga kerja konstruksi berkualitas yang ditunjukkan melalui sertifikat, tapi juga jumlah yang banyak. Karena itu perlu dukungan dari stakeholders konstruksi untuk mencetak banyak tenaga kerja konstruksi.

Tidak lupa, Inovasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur juga sangat dibutuhkan. Dimasa yang akan datang Indonesia akan dibanjiri oleh barang dan jasa teknologi dari luar negeri. Perkembangan ini harus dapat dijadikan sebagai potensi dan motivasi dalam menciptakan ide-ide atau karya yang inovatif oleh anak negeri demi mewujudkan kemandirian bangsa.

Melihat tantangan dan peluang tersebut tentunya peran dari stakeholders konstruksi, seperti : kontraktor, konsultan, pengusaha yang bergerak di bidang rantai pasok konstruksi dan pelaku K3 Konstruksi, dan lain sebagainya, sangat diperlukan. Untuk itu sangatlah tepat ajang perhelatan akbar seperti Konstruksi Indonesia, yang secara rutin sejak 2003 dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, diikuti oleh seluruh pelaku dan *stakeholders* konstruksi.

"Konstruksi Indonesia 2018 akan diselenggarakan pada 31 Oktober – 2 November 2018 di Jakarta International Expo Indonesia Konstruksi Indonesia 2018 menjadi sarana konsolidasi para pelaku usaha industri konstruksi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dan solusi untuk perkembangan konstruksi di tanah air. Selain itu Konstruksi Indonesia menjadi wadah untuk membangun relasi, membuka peluang bisnis baru serta sumber edukasi bagi para pelaku industri konstruksi di Indonesia", ujar Anita Firmanti.



Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin menyatakan Peluang Bisnis Konstruksi di Indonesia terbuka lebar dengan masifnya pembangunan infrastruktur serta konstruksi lainnya. Pemerintah juga terus mendorong pelaku usaha jasa konstruksi swasta nasional untuk terlibat aktif dalam investasi dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Syarif menambahkan, pemanfaatan peluang bisnis konstruksi harus mengedepankan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan sosial.

"Oleh karena itu, Industri Konstruksi Nasional akan meningkatkan kemampuannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas," tegas Syarif.

Sementara itu Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa sektor swasta siap untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur. Rosan berharap swasta lebih banyak mendapat kesempatan bekerja pada proyek-proyek dengan dana APBN sehingga dapat berkembang seperti BUMN, dan juga agar BUMN-BUMN tersebut tidak menjadi overload.

"BUMN-BUMN sudah harus berkoncentrasi pada pekerjaan-pekerjaan dengan nilai sangat besar dan beresiko tinggi serta berkiper di luar negeri, sementara yang swasta biarlah mengerjakan proyek-proyek standard", tutur Rosan.

Ketua LPJK Nasional mengungkapkan kesiapannya mendukung kegiatan Konstruksi Indonesia di tahun ini dengan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga ahli di bidang jasa konstruksi. Kegiatan dukungan LPJK Nasional pada KI 2018 ini adalah program 7000 sertifikasi tenaga terampil gratis dan harga khusus bagi sertifikasi tenaga ahli dalam rangka mendukung pemerintah mencapai tenaga kerja konstruksi bersertifikat di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan tugas LPJK Nasional sebagaimana amanah dalam UUJK. Selain sertifikasi, LPJKN turut melaksanakan ber-

bagai *workshop* bidang infrastruktur dan kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan SDM sektor konstruksi.

Konstruksi Indonesia 2018 menghadirkan beragam produk dan jasa konstruksi, serta solusi dan inovasi terbaru, yang diikuti 12.000 peserta pameran yang terdiri dari perusahaan teknik sipil, kontraktor, konsultan, dan pemangku kepentingan di bidang konstruksi & infrastruktur.

"Ajang ini diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap terkait tren serta peluang yang ada di industri konstruksi tanah air. Melalui wadah yang menghubungkan langsung para profesional lokal dan internasional ini, Konstruksi Indonesia 2018 diharapkan mampu menghadirkan solusi serta inovasi-inovasi terbaru di sektor konstruksi yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur", ujar William Owen selaku Direktur Tarsus Indonesia, sebagai pihak Event Organizer.

Konstruksi Indonesia 2018 diselenggarakan bersamaan dengan *Green & Smart Building* Indonesia dan Indonesia Infrastructure Week. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.constructionindonesia.com.*

Konstruksi Indonesia 2018 akan diselenggarakan pada 31 Oktober – 2 November 2018 di Jakarta International Expo Indonesia Konstruksi Indonesia 2018 menjadi sarana konsolidasi para pelaku usaha industri konstruksi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menghasilkan inovasi-inovasi terbaru



TINGKATKAN PEMAHAMAN KONTRAK KONSTRUKSI, Kementerian PUPR Luncurkan Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi

Tim Subdit Kontrak Konstruksi,
*Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi*

Sebagaimana diketahui, Pembinaan Konstruksi menjadi salah satu Program utama Pemerintah untuk menciptakan sektor konstruksi yang handal dalam mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Untuk itulah Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, sebagai pengembal amanah Pembinaan Konstruksi, melakukan berbagai upaya melalui program-program nyata.

Salah satu yang menjadi upaya tersebut adalah Peningkatan kualitas Penguasaan dan pemahaman pelaksanaan Kontrak Konstruksi oleh PPK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini dilakukan agar tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi terjamin, terutama selama proyek-proyek konstruksi berlangsung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Salah satu bentuk terobosan yang diusung oleh Kementerian PUPR adalah Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi sebagai media layanan pendampingan, pemanduan, konsultasi, dan nasehat teknis oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pengguna jasa dan penyedia jasa (bentuk perseorangan maupun badan usaha) dalam rangka menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi ini dinilai penting untuk dilaksanakan karena dalam penyelenggaraan konstruksi, kontrak merupakan bagian penting untuk pengendalian pelaksanaan konstruksi.

Kegiatan Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Agustus 2018 di Ruang Serba Guna Lantai



Direktur Jenderal Bina Konstruksi memberikan sambutan pada acara Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi



Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, M.Sc (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), MDBF, ACIAArb, ACPE memberikan materi terkait kontrak konstruksi

17 Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dihadiri peserta sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang.

Kegiatan Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Dalam sambutannya, Syarif

mengatakan bahwa Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi merupakan layanan permasalahan hukum dalam memberikan pelayanan terhadap konsultasi yang terkait dengan kontrak pembinaan konstruksi.

Permasalahan kontrak yang selama ini terjadi merupakan masalah hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Oleh karena itu sejak awal pelaksanaan kontrak, pelaksana tugas satuan kerja harus dibekali dengan pemahaman yang kuat terhadap peraturan-peraturan kontrak konstruksi. Penggunaan jenis kontrak konstruksi harus disesuaikan dengan beberapa hal, antara lain karakteristik pekerjaan, pemilihan rancangan kontrak, penetapan spesifikasi (Kerangka Acuan Kerja) hingga harga penetapan kontrak yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan hingga pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan fungsinya.

Menurut Syarif Burhanuddin, dibutuhkan tenaga ahli profesional yang memahami hukum kontrak pelaksanaan konstruksi seperti tenaga ahli konstruksi yang menguasai kontrak pekerjaan dan analisis pekerjaannya.

Acara ini menghadirkan Narasumber narasumber terpercaya di Bidang Kontrak Konstruksi antara lain : Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, M.Sc (Civ), MSBA (Bus), MH (Law),



Narasumber dan moderator

Pada FIDIC edisi tahun 2017, terdapat klausul *dispute avoidance* (pencegahan sengketa), selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah mencantumkan terkait pencegahan sengketa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dibentuknya Dewan Sengketa. Organisasi internasional Dewan Sengketa yang sudah terbentuk salah satunya adalah DRBF (*Dispute Resolution Board Foundation*).

Beberapa lembaga arbitrer internasional pun kini sudah memiliki divisi Dewan Sengketa. Hal ini dikarenakan keberhasilan praktik Dewan Sengketa di proyek-proyek



Diskusi dan tanya jawab



Peserta kegiatan Layanan Konsultasi Kontrak Konstruksi

MDBF, ACIAArb, ACPE selaku pakar dan praktisi ; Ir. Drs. Hasan Basri, Sp.1, M.T., M.Si. selaku Jafung Bina Konstruksi ; dan Ir. Siwi Subekti, M.T. selaku Kepala Subdirektorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam paparannya, Sarwono Hardjomuljadi, menjelaskan tentang kontrak konstruksi yang bersumber dari FIDIC (*Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils*). Sarwono menyebutkan bahwa potensi terjadinya sengketa kontrak konstruksi antara lain kurangnya pemahaman mengenai: model kontrak, penyusunan kata pada kontrak, substansi klaim, tata cara klaim, tata cara pencatatan dan pelaporan, tata cara *variation order*, dan tata cara penyelesaian sengketa.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Dirjen Bina Konstruksi, bahwa penggunaan kontrak harus disesuaikan salah satunya dengan karakteristik pekerjaan, Sarwono mengatakan bahwa kontrak EPC salah satunya cocok untuk proyek *power plant* sedangkan kontrak *Design and Build* salah satunya

cocok untuk proyek pembangkit listrik.

Dalam kontrak *Design and Build* seharusnya setelah tanda tangan kontrak, dilakukan amandemen ke-1 karena biasanya desain awal belum final, hanya untuk penawaran saja. Hal ini didukung dengan poin "*contract price to adjustment*" pada semua model kontrak. Setiap pekerjaan tidak ada yang memiliki harga final, artinya tidak ada kontrak konstruksi yang tidak berubah.

Penyusunan kata pada kontrak juga perlu diperhatikan untuk menghindari perbedaan interpretasi. Salah satu usul dari Sarwono adalah penggunaan kata '*harga kontrak*' dibandingkan '*nilai kontrak*'.


Sarwono menambahkan bahwa klaim dalam proyek konstruksi merupakan sesuatu yang wajar dan biasa terjadi. Akan tetapi penyelesaian sengketa seringkali terhambat, antara lain dikarenakan kurangnya edukasi, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, pemahaman yang kurang mengenai filosofi kontrak konstruksi, perbedaan interpretasi kontrak, serta lambatnya *decision making*.

internasional dalam upaya pencegahan sengketa. Hal ini patut untuk diterapkan di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang diyakini memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni untuk turut andil dalam upaya pencegahan sengketa kontrak konstruksi.

Sarwono juga menjelaskan terkait pemutusan kontrak. Putus kontrak dapat dilakukan oleh PPK sebagai pengguna jasa maupun penyedia jasa. Putus kontrak oleh PPK bisa disebabkan oleh karena kesalahan penyedia jasa dan/atau karena kepentingan pengguna jasa. Jika terjadi putus kontrak maka yang dibayar kepada Penyedia adalah hanya yang terpasang saja.

Setelah pemaparan materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Hasil diskusi pada pertemuan ini adalah penerapan kontrak *Design and Build* perlu kehati-hatian serta penerapan "*Taking Over of Parts of the Works*" dapat dilakukan dengan pemahaman yang tepat.*

Peningkatan Kompetensi bagi Pelaksana Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat

 Rino Febrando

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan sertifikasi tenaga kerja pada 501 orang peserta sertifikasi yang tengah mengikuti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pekalongan Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi terutama yang mengerjakan proyek-proyek konstruksi milik Kementerian PUPR. Di pusatkan di Gelanggang Olahraga (GOR) Jatayu di Kota Pekalongan uji praktek ini dilakukan pada 3 lokasi yang berbeda yaitu Kelurahan Pabean di Kota Pekalongan, Desa Kampil dan Desa Tosaran di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

Dari 501 peserta yang mengikuti kegiatan ini terdapat 449 tenaga kerja dengan jabatan kerja tukang batu, 46 tenaga kerja untuk jabatan kerja tukang kayu, 4 tenaga kerja untuk jabatan kerja tukang las, dan 2 tenaga kerja untuk jabatan kerja tukang pipa. Program KOTAKU ini merupakan bagian dari Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah, khususnya Kementerian PUPR.

Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk dapat menyediakan infrastruktur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan, juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat.

Melalui Program IBM sumber daya manusia dalam pelaksanaan ini dapat menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan pencapaian mutu konstruksi. Serta

melalui program KOTAKU ini dapat menjadi salah satu *output* infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan standar teknis yang berlaku serta dapat dimanfaatkan sesuai usia layanannya.

Hingga saat ini, Kementerian PUPR menjadi garda terdepan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, dengan memiliki sertifikat tenaga kerja konstruksi artinya memiliki kemampuan, kompetensi dan kualitas yang baik sehingga kualitas pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia pun akan terjamin. Hal ini pun sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi **wajib** memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dan Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa **wajib** mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Kementerian PUPR, sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki program dan kegiatan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara swakelola maupun menunjuk penyedia jasa konstruksi. Telah banyak yang dapat kita lihat dan nikmati, hasil dari pekerjaan konstruksi yang

dilakukan oleh penyedia berupa jalan, jembatan, terowongan, waduk, bendungan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan sebagainya.

Sedangkan program dan kegiatan swakelola di Kementerian PUPR antara lain Pemeliharaan Jalan Rutin, Rumah Swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (OP Irigasi), serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pekerjaan konstruksi sebagai bagian dari pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dilakukan dengan cara swakelola. Berdasarkan pasal 16 ayat (6), ada 4 tipe swakelola, kurang lebihnya dinyatakan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan dilaksanakan penanggung jawab anggaran,





Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Fasilitas Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Kerja Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), di Pekalongan Rabu (25/7)

- b. Perencanaan dan pengawasan oleh penanggung jawab anggaran dan pelaksanaan dilakukan instansi lain,
- c. Perencanaan dan pengawasan oleh penanggung jawab anggaran dan pelaksanaan dilakukan oleh ormas, dan
- d. Perencanaan oleh penanggung jawab anggaran dan/atau usulan kelompok masyarakat, dan pelaksanaan serta pengawasan dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Dari 4 tipe swakelola, terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu **perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan**. Jika ditelusuri lebih lanjut saat ini, dominasi pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan Kementerian PUPR adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat pembangunan diikuti pekerjaan konstruksi yang bersifat pemeliharaan. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat pengoperasian, pekerjaan konstruksi yang bersifat pembongkaran, dan pekerjaan konstruksi yang bersifat pembangunan kembali masih relatif sedikit ditemukan pada proyek Kementerian PUPR.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai unit organisasi pemerintah memiliki tugas melaksanakan pembinaan jasa konstruksi telah memformulasikan berbagai program peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi, di antaranya dengan menggunakan metode *Mobile Training Unit* (MTU) atau *mobile* pelatihan keliling yang diharapkan mampu memberikan pelatihan dan uji sertifikasi

kepada tenaga kerja konstruksi secara keliling hingga ke pelosok negeri, Pelatihan Mandiri ini memanfaatkan tenaga kerja konstruksi (mandor) untuk melakukan pengujian kepada tenaga kerjanya (tukang). Sebelum melakukan uji, mandor harus mendapatkan sertifikasi kompetensi dan instruktur mandiri. Dan *Distance Learning* atau pelatihan jarak jauh pelatihan ini merupakan jenis pelatihan yang ditujukan kepada tenaga kerja konstruksi ahli dengan memanfaatkan jaringan internet sehingga bisa di akses dimanapun dan kapanpun, dan Observasi yaitu uji sertifikasi yang dilaksanakan melalui *assessment* dengan cara melakukan tes tertulis, wawancara dan praktek kerja lapangan. Pada saat tenaga kerja melakukan praktek kerja lapangan dilakukan *observasi* untuk melihat secara langsung kinerja tenaker tersebut apakah sudah layak untuk mendapatkan sertifikat.

Dengan berbagai metode ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah

akses para tenaga kerja konstruksi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan kerja yang diperlukan. Khusus untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat KOTAKU ini, dilakukan dengan metode observasi.

Kedepannya seluruh tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi ini nanti akan di data dan masuk ke dalam Sistem Informasi Pemberdayaan Tenaga Kerja (DAYANAKER) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Sehingga ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dapat terus kami pantau di seluruh Indonesia dan tentunya dapat memperkuat sistem rantai pasok pembangunan infrastruktur, yang sampai dengan saat ini masih memiliki *gap* yang cukup besar. Melalui pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian serta kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata.*

Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat diselenggarakan bertujuan untuk dapat menyediakan infrastruktur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan, juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat.



MANAJEMEN RISIKO KOMPREHENSIF dalam Proyek KPBU Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Persampahan

✍ Yolanda Indah Permatasari, SE, MM
Harry Setyawan, ST, M.Sc.

Risiko merupakan keadaan adanya ketidakpastian (*uncertainty*) akan terjadinya suatu keadaan yang tidak dikehendaki karena kurang atau tidak adanya informasi yang cukup tentang apa yang terjadi yang dapat menyebabkan kerugian. Keberadaan risiko bersifat absolut dan tidak dapat dihindarkan, termasuk dalam proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Persampahan. Penyediaan infrastruktur SPAM dan Persampahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan dana APBD/N atau dengan skema KPBU, namun perlu diketahui bahwa dalam proyek dengan skema konvensional (APBN) berarti hampir seluruh risiko ditanggung oleh pemilik proyek, sementara penggunaan skema KPBU artinya akan ada pembagian risiko antara pemilik proyek dengan Badan Usaha (BU). Pembagian risiko yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan mengikat kedua belah pihak yaitu PJKP dalam hal ini PDAM

atau Kepala Daerah, dan Badan Usaha/Swasta.

Prinsip dasar pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta adalah risiko harus dialokasikan kepada pihak yang paling mampu untuk mengelola risiko yang dalam hal ini mengurangi kemungkinan (*probability*) dan/atau dampak (*impact*) dari terjadinya risiko. Meskipun demikian, Pemerintah pada akhirnya akan tetap mendapatkan *exposure* jika terjadi kegagalan infrastruktur yang dalam hal ini yaitu terhentinya pelayanan publik kepada masyarakat akibat dari berhenti beroperasinya proyek infrastruktur tsb. Oleh karena itu, Manajemen risiko penyediaan infrastruktur harus disusun dan dilakukan oleh PJKP secara komprehensif.

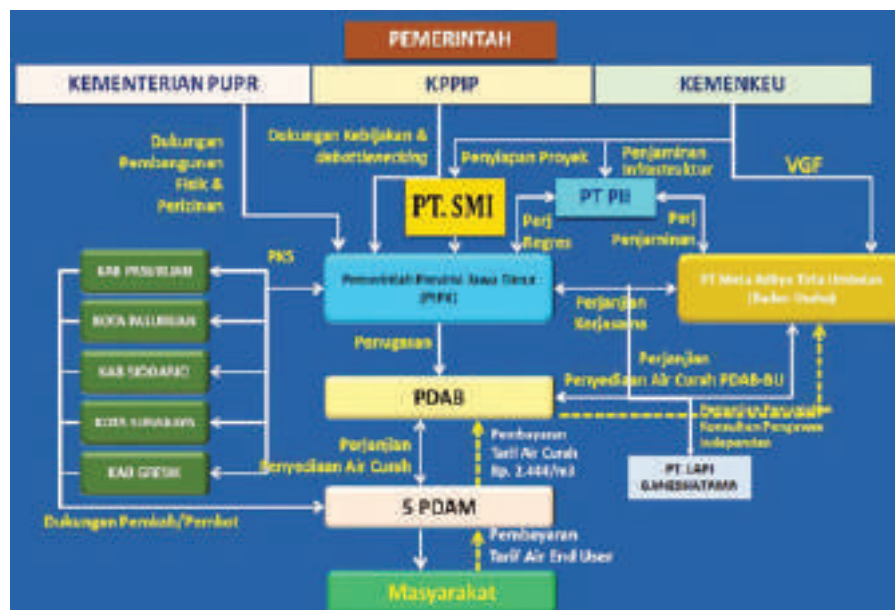
Manajemen risiko penyediaan infrastruktur melalui KPBU dilakukan dengan beberapa tahapan yang salah satunya adalah identifikasi risiko, pemetaan dan alokasi risiko, serta penyusunan mitigasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan mendaftar semua risiko yang mungkin terjadi di setiap tahap KPBU (perencanaan,

penyiapan, transaksi, konstruksi dan operasional), kemudian dipetakan ke dalam beberapa kategori risiko. Setelah itu, risiko dialokasikan kepada Pemerintah ataupun Badan Usaha berdasarkan *best practice* dan *common practice*. Ketepatan alokasi risiko akan berdampak pada Perjanjian KPBU dan komitmen PJKP dan Badan Usaha dalam melaksanakan mitigasi risiko KPBU. Selanjutnya, dilakukan penyusunan langkah-langkah mitigasi dari setiap risiko teridentifikasi dengan mempertimbangkan alokasi risiko yang ada.

Saat ini terdapat beberapa Proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Persampahan yang dilakukan dengan skema KPBU, salah satunya yaitu Proyek SPAM Umbulan dan Proyek Pengelolaan Sampah Lulut Nambo. Kedua sektor infrastruktur ini memiliki karakteristik risiko yang berbeda, yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemetaan baik item risiko maupun mitigasi terhadap risiko-risiko yang terindikasi dapat menghambat pelaksanaan pembangunan maupun penyediaan layanan kepada masyarakat sampai akhir

Untuk mendapatkan pembelajaran dari *best practice* KPBK baik itu bidang SPAM dan persampahan, DBK, pada sesi kedua, juga menghadirkan narasumber dari Proyek SPAM Umbulan yaitu Bapak Lilik Soleh Wartadiprja sebagai Kepala DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur dan dari proyek TPPAS Regional Lulut Nambo Bapak Edi Bachtiar selaku Kepala Balai Pengolahan Sampah Regional Provinsi Jawa Barat.

Proyek SPAM Umbulan merupakan salah satu proyek *showcase* KPBK bidang SPAM yang dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan air minum di beberapa kota di Jawa Timur, serta adanya sumber air yang belum termanfaatkan dengan baik. Luasnya cakupan proyek ini, yang melibatkan 5 Kabupaten/Kota dengan 16 unit *offtake*, membuat pertanggungjawaban harus dilakukan oleh *stakeholder* yang memiliki kewenangan terbesar di Jawa Timur yaitu Gubernur Jawa Timur sebagai PJPK. Proyek ini membutuhkan waktu cukup panjang sejak diinisiasi tahun 1970, sampai *financial close* pada tahun 2016 dan memulai tahap



Gambar 5. Struktur Kerjasama Provek SPAM Umbulan

Tantangan yang terbesar bagi PJPK proyek SPAM Umbulan adalah untuk mendapatkan komitmen dan dukungan kerjasama dari 5 Pemerintah Daerah. Dan semakin berat karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa kerjasama antar Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Berdasarkan pengalaman PJPK, dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup regional proyek, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang tergambar dalam struktur kerjasama (Gambar 2) merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dilaksanakan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada proyek KPBU dilakukan pembagian risiko dan tanggung jawab antara Pemer-

intah dan Badan Usaha. Pada proyek ini, Badan Usaha yang ditunjuk, yaitu PT. Meta Adhya Tirta Umbulan berperan dalam membangun dan mengoperasikan sistem produksi, transmisi dan meter induk. Sementara, Pemerintah bertanggungjawab dalam membangun JDU dari *offtake* ke reservoir PDAM. Risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dialokasikan kepada Pemerintah beserta mitigasinya ditampilkan dalam Tabel 1.

TPPAS Regional Lulut Nambo yang terletak di Kabupaten Bogor, memiliki masa konsesi yang sama dengan SPAM Umbulan, yaitu 25 tahun. Kontrak TPPAS Regional Lulut Nambo ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2017, dan direncanakan akan *financial close* pada bulan Juni 2018. Teknologi pengolahan sampah yang digunakan pada proyek ini adalah Teknologi refuse derived fuel (RDF) dimana sampah akan diolah menjadi RDF dan akan dijual kepada perusahaan semen yaitu PT. Indocement sebagai *off taker*. TPPAS Regional Lulut Nambo ini diharapkan dapat melayani pemusnahan sampah untuk Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok, sehingga komitmen dan dukungan kerjasama dari 3 Pemerintah Daerah ini juga menjadi hal yang penting.

Terdapat sebuah keunikan pada proyek KPBU ini dimana BUMD memiliki posisi sebagai *standing partner*, yaitu badan usaha yang langsung bergabung dengan pemenang lelang, tetapi tidak mengikuti lelang. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian kepemilikan saham bagi daerah



Tabel 2. Daftar Risiko Proyek KPBU TPPAS Lulut Nambo serta Alokasi dan Mitigasinya

RISIKO	STRATEGI MITIGASI
Lokasi Lahan	Monitoring hasil evaluasi untuk keperluan perpanjangan kerjasama setiap 5 tahun sekali dengan Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Hutan dan Peraturan Pemerintah terkait, yang terbit terbaru.
Perijinan	Tanggung jawab pemerintah mengevaluasi seluruh perijinan yang diminta, dan potensi adanya keterlambatan atau ketidakmampuan proyek mendapatkan perijinan sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani dengan BUPP
Penyesuaian jasa pengelolaan dan pengolahan sampah periodik terlambat	Tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk menetapkan tarif berdasarkan proyeksi awal yang disebutkan dalam kontrak
Kegagalan kualitas olahan RDF	Melakukan quality control secara ketat dalam meningkatkan frekuensi pengendalian kualitas, meningkatkan prosedur jaminan mutu
Proyeksi volume permintaan output proyek	Studi kelayakan yang solid dilakukan oleh penawar Pemprov harus menetapkan perkiraan yang realistis Pemerintah Provinsi harus mensosialisasikan kepada masyarakat
Berkurangnya kuantitas input (sampah)	Memastikan jumlah alat angkut yang tersedia, kondisi alat angkut yang dioperasikan, dan kelancaran akses jaringan jalan
Menurunnya kualitas input (komposisi sampah)	Melakukan penyortiran kualitas sampah pada saat penimbangan
Kondisi darurat akibat kahar politik	Apabila keadaan kahar karena politik pemegang kontrak kerjasama akan mengumumkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat bertanggungjawab dengan konsekuensi pembayaran atas biaya yang dikeluarkan oleh pemegang kontrak bersama
Kehilangan aset	Inspeksi aset berkala oleh Instansi teknis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemegang kontrak kerjasama dan Program pengelolaan aset harus memasukan aktivitas perbaikan besar atau penggantian aset

dalam proyek KPBU. Salah satu tantangan dan risiko yang dihadapi di proyek ini yaitu Perizinan, termasuk untuk pengolahan RDF dan pengolahan limbah B3, serta harus adanya project management unit (PMU) dan pengawasan independen. Beberapa risiko pada proyek KPBU Lulut Nambo serta alokasi dan strategi mitigasinya, ditampilkan dalam Tabel 2.

Dalam kegiatan ini, Pemerintah Daerah sebagai peserta telah mendapatkan gambaran secara rinci mengenai risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam investasi infrastruktur SPAM dan pengolahan sampah berdasarkan *best practice* dari kedua sektor tersebut. Kegiatan ini menggarisbawahi adanya *gap* dalam pemahaman ASN Pemerintah Daerah sebagai calon PJPK mengenai risiko proyek KPBU beserta cara mitigasinya. Pemahaman yang baik akan risiko dan cara mitigasinya akan berdampak pada lancarnya pelaksanaan proyek KPBU sesuai dengan rencana. Lebih lanjut lagi, risiko-risiko dan cara mitigasinya dari kedua *best practice* ini akan digunakan dalam penyempurnaan Pedoman Supervisi Teknis Alokasi Risiko Investasi Infrastruktur Bidang Persampahan, yang akan didistribusikan kepada Pemerintah Daerah, terutama PJPK persampahan pada akhir 2018. Dengan adanya buku

pedoman yang sedang disempurnakan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan dan memetakan risiko proyek yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU, khususnya untuk kedua sektor tersebut.

Manajemen risiko penyediaan infrastruktur melalui KPBU dilakukan dengan beberapa tahapan yang salah satunya adalah identifikasi risiko, pemetaan dan alokasi risiko, serta penyusunan mitigasi risiko.

Tabel 1. Daftar Risiko Proyek KPBU SPAM Umbulan serta Mitigasinya

RISIKO	MITIGASI
Penurunan/Berkurangnya Kuantitas Sumber air baku	Melakukan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi Wilayah Resapan (<i>Incharge</i>), Lepasana (<i>Discharge</i>) Mata Air Umbulan serta Kuantitas Air baku di Titik-Titik pengambilan di mata air
	Menetapkan regulasi untuk membatasi Jumlah dan Debit Pengambilan ABT; Jml Titik, dengan kapasitas l/d per Kecamatan atau per Desa
	Melaksanakan Pembangunan IPA untuk sumber Air baku tambahan dari Kali Rejoso
Penurunan Kualitas Air baku dan Kualitas Air baku lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Perjanjian.	Melakukan Pengelolaan dan Pengendalian serta evaluasi Pencemaran di Daerah Resapan dan Lepasana, serta kualitas air baku di titik-titik pengambilan
	Menetapkan titik-titik pengambilan di mata air Umbulan dan sekitarnya serta baseline data untuk kualitas air baku pada Titik pantau
Keterlambatan penerbitan/ persetujuan perizinan yang merupakan Kewajiban Pemerintah	Persetujuan Prinsip Terkait Pelaksanaan Konstruksi dan operasional
Kegagalan PDAB menyerap Air minum curah yang diproduksi oleh Badan Usaha.	Monitoring Konstruksi dan Instalasi pipa <i>offtake</i> dan <i>reservoir</i> terlambat dibangun oleh Kementerian PUPERA
	Antisipasi Kegagalan pembangunan konstruksi jaringan distribusi PDAM untuk mendukung penyerapan target jumlah sambungan rumah
	Implementasi Program Penurunan Angka Kebocoran, NRW di Jaringan Pipa Distribusi PDAM
Kegagalan PDAB membayar Tarif kepada Badan Usaha yang terjadi karena terlambatnya PDAM membayar kepada PDAB.	Ketersediaan <i>Standby Loan</i> dari Lembaga Keuangan
	Komitmen Dukungan Pemda Kabupaten/Kota kepada PDAM terutama dalam penerbitan Perda/Pergub terkait penyertaan modal PDAB
	Monitoring pembayaran tagihan
Keterlambatan Pembayaran Air minum curah oleh PDAB kepada Badan Usaha yang terjadi karena keterlambatan penyertaan modal.	Monitoring pembayaran tagihan (dari PDAM kepada PDAB; PDAB ke BU) dan kapasitas Keuangan PDAB



Public Sector Comparator

Sebagai Metode Penilaian *Value For Money* Dalam Penentuan Pemilihan Skema Penyediaan Infrastruktur

✍ E. Hardiansyah P. Putra, ST, MSc
Hilda Isfanovi, ST, MPSDA

Target pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 bidang infrastruktur memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur prioritas mencapai IDR 4.976 Triliun. Dimana hampir separuhnya merupakan kebutuhan investasi bidang ke-PUPR-an prioritas sebesar Rp. 1.915 triliun. Kemampuan Pemerintah (APBN dan APBD) hanya sekitar Rp. 1.289 Triliun (67.6%), dengan potensi pendanaan BUMN sekitar Rp. 128.7 Triliun (7%). Diharapkan funding gap sebesar Rp. 496.6 Triliun (24.4%) dapat dipenuhi melalui sumber dana alternatif. Berdasarkan Perpres 38 Tahun 2015 disebutkan 19 jenis infrastruktur yang dapat di kerjasamakan, dimana 9 diantaranya merupakan infrastruktur yang menjadi domain Kementerian PUPR. Hal ini menjadikan Kementerian PUPR merupakan Kementerian teknis yang menangani mayoritas infrastruktur publik di Indonesia.

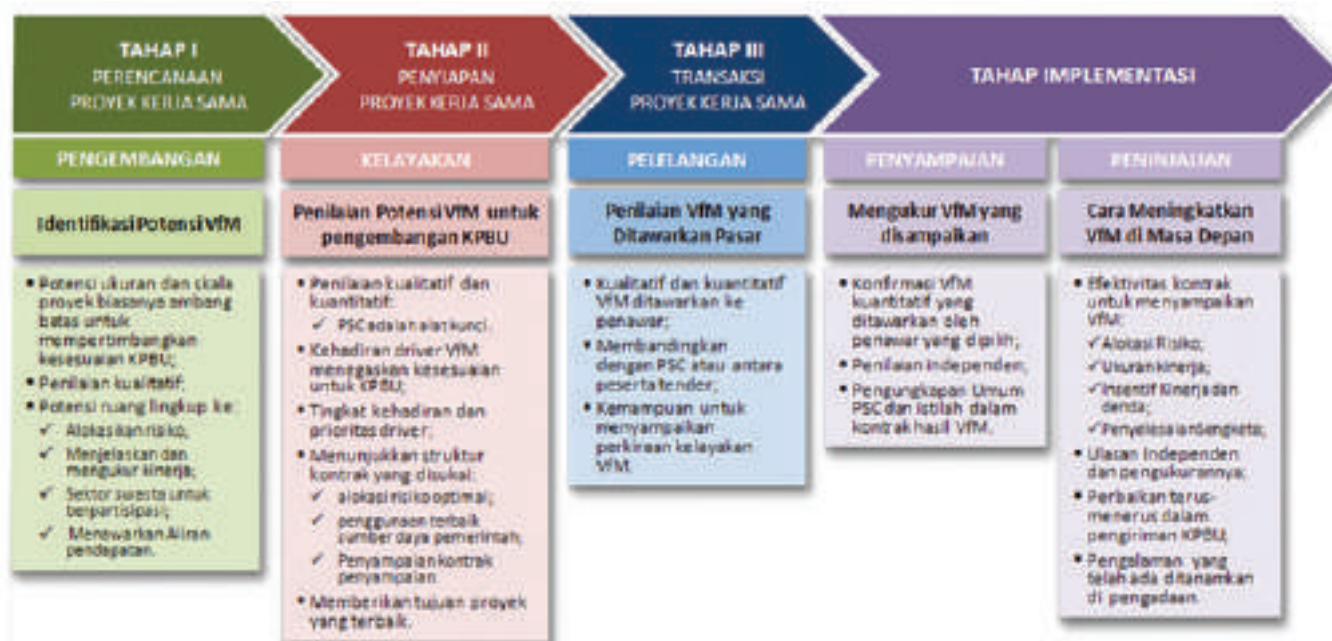
Umumnya, untuk menjawab kebutuhan pengadaan infrastruktur publik tersebut, pemerintah dapat menggunakan berbagai opsi skema pendanaan, antara lain Anggaran Pemerintah (APBN/D), BUMN, maupun partisipasi badan usaha. Oleh karenanya, perlu metodologi yang tepat untuk digunakan dalam pemilihan skema pendanaan apa yang tepat harus digunakan untuk memilih skema

pendanaan yang sesuai untuk membiayai suatu proyek infrastruktur. Hal ini menjadi penting karena selain karena terbatasnya anggaran, efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur bergantung pada pemilihan skema pendanaan. Salah satu prinsip dalam pengambilan keputusan suatu proyek infrastruktur dapat digunakan dalam skema KPBU adalah dengan Value For Money (VfM).

Analisa value for money umumnya digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengevaluasi kerjasama dengan sektor privat. Proses analisis VfM digunakan untuk membandingkan tingkat manfaat dan biaya dengan menggunakan KPBU dengan pengadaan konvensional. Selain membantu dalam pengembangan program investasi, Pemilihan opsi pengadaan proyek, dan pemilihan pemenang lelang, VfM dalam KPBU juga berfungsi untuk (NSW, 2006): (i) Meningkatkan manajemen risiko; (ii) Kepemilikan dan seluruh siklus biaya; (iii) Titik kontak (tanggung jawab kelompok); (iv) Pemanfaatan asset; (v) Hasil keseluruhan dari pemerintah. Pada tahapan KPBU telah dilakukan penilaian VFM agar mendapatkan proyek yang maksimal. Hal ini seperti nampak dalam gambar 1.

Metode VfM (*Value For Money*)

VfM dapat diartikan sebagai “pencapaian nilai uang”, yang mengukur seberapa ekonomis, efisien, dan efektifkah sebuah pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui suatu skema pembiayaan dibandingkan dengan skema pembiayaan lainnya. Pada Gambar 1 terlihat bahwa penilaian VfM dapat dilakukan pada



Sumber: Permen Bappenas n.o 4 tahun 2015 dan Hasil analisis.
Gambar 1 Penilaian Vfm pada Tahapan KPBU

setiap tahapan dalam KPBU, dan utamanya metode ini dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap penyiapan, sebagai tools untuk menentukan apakah suatu proyek pemerintah dilaksanakan dengan pengadaan konvensional, maupun dengan skema KPBU.

Vfm sendiri mempunyai beberapa dimensi tolok ukur, yaitu antara lain harga (monetary value), pembagian alokasi risiko proyek (risk allocation), dan standar pelayanan infrastruktur (output specification). Jadi, di dalam analisa Vfm, harga bukan satu-satunya parameter yang dilihat, namun juga diperhatikan pembagian alokasi proyek yang ideal dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh sektor swasta (Duncan Cartlidge, 2006). Suatu proyek yang mempunyai Vfm, lebih optimal dilaksanakan dengan KPBU karena terdapat efisiensi dan inovasi teknologi yang ditawarkan oleh sektor swasta serta transfer resiko (risk sharing) yang dapat dibagi kepada sektor swasta. Oleh karenanya, proyek infrastruktur harus memberikan VFM bagi pemangku kepentingan, terlepas apakah proyek akan didanai melalui pengadaan konvensional maupun melalui public-private partnership (KPBU). Apapun modalitas yang dipilih harus menciptakan VFM terbaik dibandingkan alternatif yang ada yaitu proposal yang menawarkan pilihan terbaik.

Metode Vfm Kuantitatif

Salah satu metode kuantitatif dalam prinsip Vfm adalah Public Sector Comparator/Pembandingan Sektor Publik (PSC). PSC digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan dengan cara menguji apakah investasi swasta dalam penyediaan Infrastruktur menawarkan kualitas yang lebih baik (Vfm) dibanding melakukan penyediaan infrastruktur melalui pengadaan publik yang paling efisien. PSC memperkirakan biaya risiko hipotetis yang disesuaikan jika suatu proyek dibiayai, dimiliki, dan dilaksanakan oleh pemerintah. Analisa pembandingan sektor publik dalam perusahaan infrastruktur ini diharapkan menjadi landasan awal penyiapan proyek-proyek KPBU agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU bila dibandingkan dengan penyediaan infrastruktur melalui pengadaan barang/jasa sektor publik pada umumnya. Ringkasnya, tujuan dari PSC adalah untuk menjawab dua pertanyaan berikut : (1) Apakah proyek ini baik ? ,

dan (2) Apakah proyek ini sesuai bila diselenggarakan oleh badan usaha ?

Mengingat bahwa PSC adalah alat yang berharga bagi Pemerintah dalam menentukan nilai uang, sangat penting bahwa hal ini harus dipersiapkan dengan hati-hati dan komprehensif. Oleh karena itu PSC menyediakan data bagi Pemerintah dengan ukuran perkiraan dari berbagai hasil akhir, beserta kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh Pemerintah apabila mengerjakan proyek dengan menggunakan metode tradisional. Beberapa hal yang diperlukan dalam PSC seperti nampak dalam gambar dibawah ini :



Sumber: Dorothy Morillos - Adjo Amekudzi, PhD - A Review of Value for Money (Vfm) Analysis for Comparing Public Private Partnerships to Traditional Procurement; Commonwealth of Australia (2008). Gambar 2. Beberapa Hal yang Diperlukan dalam PSC

Menurut Australia National PPP Guidelines (Vol 4 PSC Guidance Dec 08), Proses PSC secara alur proses dapat digambarkan pada di gambar 3.

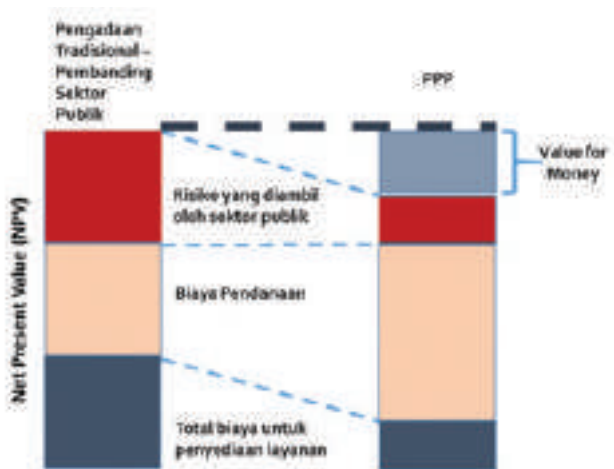
Sebelum suatu proyek infrastruktur, baik yang berasal dari program pemerintah maupun inisiatif dari swasta diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya perlu dilakukan terlebih dahulu sebuah evaluasi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya sebuah proyek infrastuktur dikerjasamakan oleh swasta, atau lebih baik dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Hui, dkk (2010) menyatakan suatu proyek publik dapat dilakukan dengan skema KPBU jika, nilai Vfm lebih besar dibanding dengan pengadaan tradisional. Sebagaimana dapat dijelaskan dalam bagan gambar 4 dan 5.



Sumber: Australia National PPP Guidelines-Vol 4 PSC Guidance Dec 08
Gambar 3. Alur Proses Public Sector Comparator



Sumber: Burger and Hawkesworth – OECD Journal on Budgeting (vol 1/2011)
Gambar 4. Hal yang Dibandingkan dalam PSC



Sumber: National Program for Public Private Partnership (2007)
Gambar 5. Contoh Perbandingan

Berdasarkan ilustrasi Gambar 4 di pahami bahwa dalam pemilihan pengadaan proyek, terlebih dahulu mencari nilai NPV dari sebuah proyek dengan opsi NPVPSK (Biaya PSC/biaya dengan pengadaan konvensional) dan NPVKPB (biaya KPB). Apabila

NPVPSK lebih besar dari NPVKPB maka sebaiknya proyek tersebut dikerjakan dengan skema KPB, demikian juga sebaliknya. sesuai dengan alur proses pemilihan pengadaan proyek di atas. Senada dengan ilustrasi sebelumnya, Gambar 5 dapat dilihat ilustrasi Komposisi NPV yang terdiri dari Total Biaya, Biaya Pendanaan, dan Risiko. Dimana adanya selisih antara NPVPSK dan NPVKPB diartikan sebagai value for money pada suatu rencana proyek. Oleh karena itu, dengan metode PSC dapat dihitung VFM secara kuantitatif.

Contoh analisis VFM adalah Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Prov. Sumatera Selatan. Proyek ini adalah salah satu pilot project jalan nasional Non Tol Dengan skema KPB (Availability Payment). Pada Gambar 6 diketahui bahwa hasil kajian Ekonomi yang terlihat dari grafik perbandingan total manfaat vs Total Biaya, proyek tersebut layak secara finansial, karena Economic Internal Rate of Return (EIRR), Economic Net Present Value (ENPV), dan Analisis Benefit Cost Ratio (BCR)-nya bernilai positif. Selain itu, hasil kajian finansial yang menghitung estimasi Pembayaran Keterediaan Layanan menyatakan bahwa Proyek ini LAYAK secara finansial, komersial, dan bankable, karena dari analisis diketahui bahwa Payback period proyek jauh lebih pendek (8.01 tahun) dibanding dengan total masa konsesi (15 tahun).



Gambar 6. Hasil Kelayakan Ekonomi dan Finansial Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera

Kesimpulan

Penentuan atas skema apa yang paling tepat untuk pembangunan infrastruktur menjadi hal penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut tak lain karena keberhasilan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh skema yang dipilih. Salah satu metode dalam pemilihan skema pembiayaan adalah dengan Vfm metode PSC. Dengan melakukan metode PSC dapat menjadikan KPB lebih efektif dan efisien karena dengan mengetahui hasil PSC, akan diketahui juga hasil value for money yang tinggi serta antisipasi-antisipasi risiko yang timbul dari proyek tersebut termasuk bagaimana menguantifikasikan risiko tersebut dengan baik dengan melihat dari hasil kuantitatif berupa nilai NPV. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan penghematan biaya proyek yang dikerjakan karena dapat mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan jika menggunakan pengadaan tradisional dan berapa besar biaya yang akan dikeluarkan bila proyek menggunakan skema KPB. Penggunaan PSC juga akan memperkecil risiko yang ditanggung oleh pemerintah terhadap proyek yang dilakukan bila menggunakan skema KPB.

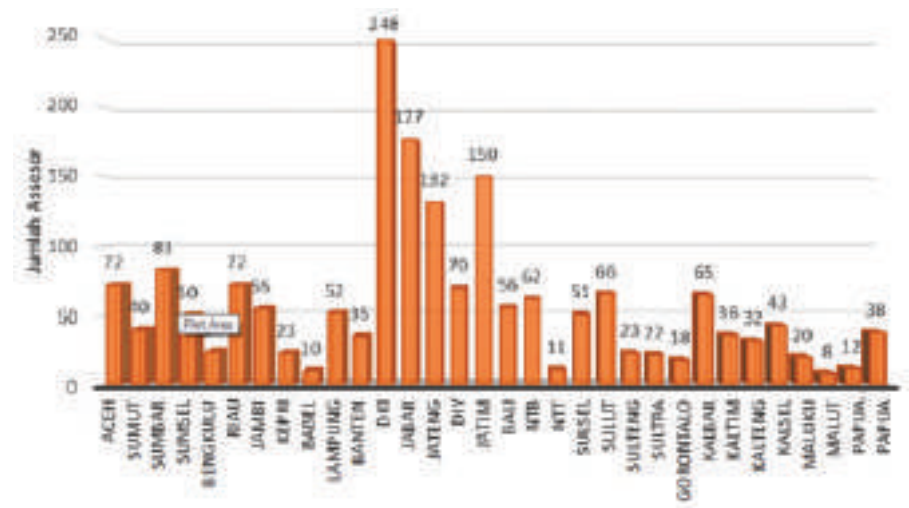


Potret Asessor untuk Mendukung Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

✍️ Darti Tresnawati, SE, MT

Assessor merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan tenaga kerja konstruksi kompeten. Dalam menciptakan tenaga kerja konstruksi kompeten, tentunya assessor pun harus kompeten pula. Assessor diartikan sebagai orang yang memiliki kualifikasi sebagai assessor (bersertifikat sebagai assessor) yang ditugaskan untuk menguji kompetensi berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Assessor yang kita maksud disini adalah assessor kompetensi konstruksi. Data assessor yang dirilis oleh Subdit Penerapan Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi pada tahun 2016 dapat mengidentifikasi jumlah assessor, tingkat pendidikannya, klasifikasi bidang ASMET (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan) dan usia assessor yang digunakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah sampai dengan tahun 2016. Penulis menggunakan data assessor 2016 dengan asumsi bahwa data assessor yang dimiliki paling update adalah data tahun 2016, dan setelah itu belum pernah ada updating lagi data assessor. Sumber data diperoleh dari masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah. Beberapa informasi yang dapat dihasilkan dari olah data assessor

ini diuraikan dalam beberapa paragraf di bawah ini.



Gambar 1. Sebaran Asessor per Provinsi

Dari Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa sebaran assessor paling banyak masih didominasi di pulau Jawa, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi dengan sebaran assessor terendah adalah Maluku Utara, Bangka Belitung dan NTT. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena secara supply, wilayah Jawa banyak mendapatkan pasokan tenaga assessor dari politeknik maupun perguruan tinggi yang memang menjamur

di Jawa, dan secara demand, kebutuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Jawa masih yang paling tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Selanjutnya, kompetensi yang dimiliki assessor juga akan berpengaruh kepada proses asesmen yang dijalankan kepada peserta uji sertifikasi. Idealnya, sebagai contoh, seorang assessor yang memiliki kompetensi di subklasifikasi bidang Jalan, maka harus memiliki SKA subklasifikasi jalan dan

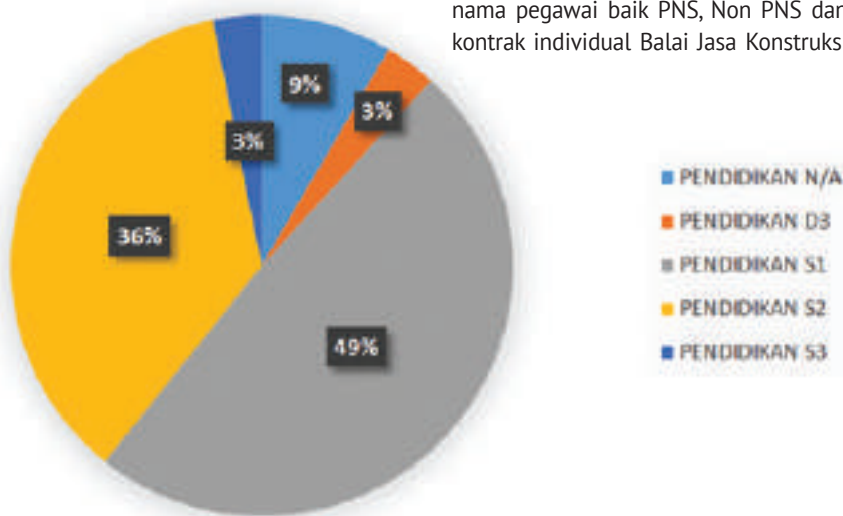
melakukan asesmen kepada peserta uji sertifikasi subklasifikasi jalan. Namun pada kenyataannya hal ini sulit berjalan karena ketersediaan assessor yang sebidang kadang kala terbatas di lapangan.

Berdasarkan Gambar 2, bahwa assessor klasifikasi Sipil masih mendominasi hampir 50%, disusul 18 % Elektrikal, 17% Arsitektur, 6% Mekanikal, 5% Tata Lingkungan, dan 1% Alat Berat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa uji sertifikasi kita dominan

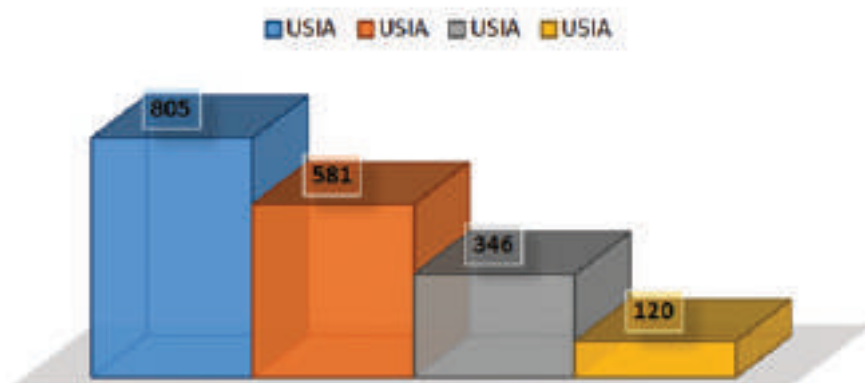
pada klasifikasi Sipil dan arsitektur, sesuai dengan kebutuhan utama pembangunan infrastruktur, dimana kebutuhan paling banyak pasti tenaga kerja konstruksi dengan jabatan kerja ahli jalan, ahli jembatan, ahli sumber daya air, mandor bangunan, tukang bangunan dan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, tingkat pendidikan asessor masih didominasi oleh S1 sebanyak 49%, disusul dengan S2 sebanyak 36%, pendidikan S3 sebanyak 3%, D3 sebanyak 9% dan data tidak valid atau tidak tersedia sebanyak 3%. Data sebaran tingkat pendidikan per provinsi untuk pendidikan S1 masih didominasi di pulau Jawa.

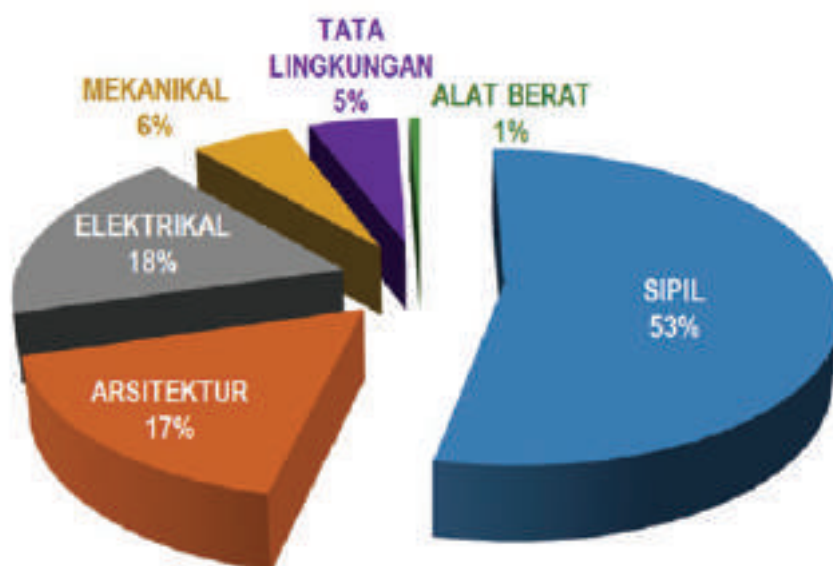
Sedangkan bila dilihat berdasarkan usia, maka dominan asessor yang ada saat ini berada pada usia produktif yaitu berada di usia 35-50 tahun sebanyak 805 orang dan usia 51 – 60 tahun sebanyak 581 orang. Namun, yang berada di usia yang sudah tidak produktif atau tidak ada datanya cukup banyak, sekitar 20%. Hal ini yang perlu diperbaharui, mengingat banyak sekali asessor yang mungkin sudah tidak bisa aktif, tetapi masih tercantum dalam database.



Gambar 3. Asessor Berdasarkan Tingkat Pendidikannya



Gambar 4. Asesor Berdasarkan Usia



Gambar 2. Asessor Berdasarkan Klasifikasi ASMET

Dari hasil olah data sebagaimana tersebut di atas, penulis menemukan beberapa hal yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut antara lain:

1. Dari sisi nama asessor yang tertulis dalam database

Melihat nama-nama asessor yang dimasukkan dalam data base terdapat nama-nama pegawai baik PNS, Non PNS dan kontrak individual Balai Jasa Konstruksi

Wilayah. Hal ini perlu dilakukan validasi lebih lanjut, apakah memang masih dimungkinkan secara waktu dan beban pekerjaan aparaturnya Balai sekaligus menjadi assessor.

2. Dari sisi usia
Dari sisi usia terutama yang berusia lebih dari 60 tahun berjumlah 346 orang dan yang tidak jelas datanya 120 orang atau total sekitar 20% . Hal ini meragukan penulis bahwa ada asessor yang saat ini usianya sudah 60 tahun ke atas, apakah secara fisik masih dapat bertugas sebagai assessor.
3. Dari sisi kepemilikan sertifikat asessor
Salah satu syarat menjadi asessor adalah bukti kepemilikan sertifikat asessor. Data menunjukkan dari 1.855 orang asessor tidak satupun terdapat data pendukung kepemilikan sertifikat asessor sehingga perlu divalidasi ulang.
4. Dari sisi pendidikan
Salah satu syarat menjadi asessor selain memiliki sertifikat asessor adalah tingkat pendidikan dan pengalaman. Terdapat nama-nama asessor yang baru lulus kuliah langsung menjadi assessor.

Dari hasil temuan penulis memberikan masukan untuk perbaikan antara lain: data perlu di update lagi dengan melakukan konfirmasi ke balai, data di update secara berkala, dan pencantuman sertifikat asessor

Gagasan Perhitungan Data Supply Demand Tenaga Kerja Konstruksi

✍️ Darti Tresnawati, SE, MT

Pertumbuhan Infrastruktur Indonesia pada kurun waktu 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada periode sebelumnya rata-rata persentase anggaran Infrastruktur terhadap total APBN berada pada kisaran 7-9%, dan di fase empat tahun terakhir ini meningkat tajam dua kali lipat menjadi 14-18%. Komitmen pemerintah melalui beberapa Kementerian teknis dan badan-badan lainnya menunjukkan belanja Infrastruktur pada periode ini mencapai kurang lebih Rp. 5.000 Trilyun.

Kementerian PUPR sebagai *leader* dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia mendapat anggaran mencapai rata-rata Rp. 100 Trilyun/tahun. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap penyediaan 5 (lima) sumber daya dalam pelaksanaannya yaitu : (1) SDM, (2) Material, (3) Peralatan, (4) Metode Pelaksanaan/Penyelenggaraan, dan (5) Pembiayaan. Kelima sumber daya ini, jika dilihat dari prioritasnya, maka SDM atau tenaga kerja konstruksi menjadi faktor yang paling vital saat ini, karena akan mempengaruhi empat sumber daya yang lain dan berdampak langsung pada kualitas produk konstruksi.

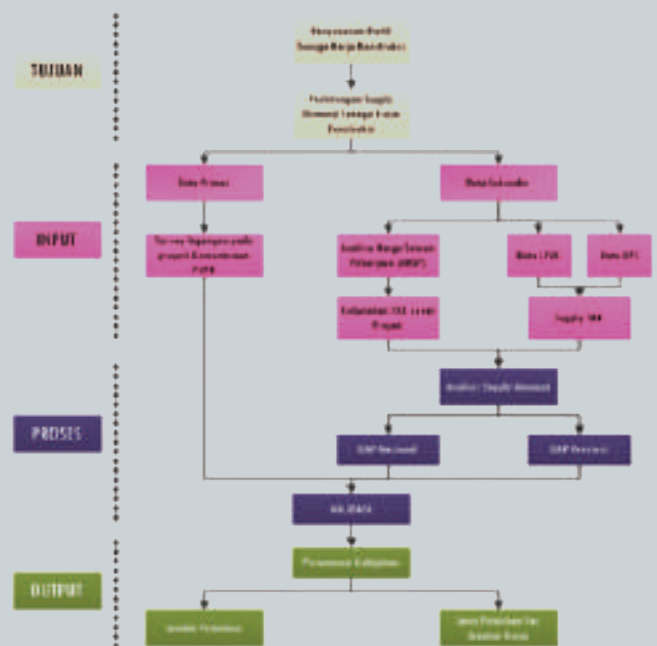
Hal ini pula yang kemudian mendorong Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi memfokuskan program nya pada pemenuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten atau bersertifikat. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai hal terkait pembinaan tenaga kerja konstruksi, terutama tentang: (1) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat pada proyek-proyek fisik yang didanai melalui APBN/ APBD; (2) Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terserap pada masing-masing proyek konstruksi; (3) Distribusi dan sebaran tenaga kerja konstruksi pada masing-masing proyek berdasarkan kualifikasinya; dan (4) Produktivitas tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada sektor konstruksi.

Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi di Indonesia khususnya terhadap infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya perlu diketahui data ketersediaan (*supply*) dan data kebutuhan (*demand*) tenaga kerja konstruksi. Soal *data literacy* inilah, kebanyakan dari kita para pemangku kepentingan atau para pengambil kebijakan masih lemah.

Masyarakat dunia modern kini semakin kompetitif dan menghendaki keterukuran yang berdasarkan kondisi faktual dan berbasis data, dalam merencanakan, mengevaluasi dan mengkritisi masa depan negara (Hasbullah J., 2018). Kadang kala data tersedia, namun tidak terstruktur dalam sebuah database, sehingga sulit diakses dan diolah. Database itu sendiri secara terminologi diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam sistem yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pemakai. Jika kebutuhan database terpenuhi maka data dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengambilan keputusan lebih akurat dengan memperhatikan data valid yang tersedia.

Kembali kepada data tenaga kerja konstruksi, untuk menda-

patkan data terkait ketersediaan atau pasokan (*supply*) tenaga kerja konstruksi dapat dihitung melalui dua cara yaitu (1) On Site (dilakukan dengan survei ke proyek-proyek konstruksi) dan (2) Off Site yaitu berdasarkan data BPS yang setiap tahun melakukan survei terhadap tenaga kerja konstruksi berbasis rumah tangga dan dari jumlah SKA dan SKTK yang dikeluarkan oleh LPJKN. Perbedaan perhitungan ketersediaan dari dua lembaga ini adalah BPS menghitung semua orang yang bekerja di sektor konstruksi baik bersertifikat ataupun tidak, sedangkan LPJKN mendata hanya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat saja sehingga pasti terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah tenaga kerja konstruksi di BPS dengan di LPJKN. Relatif untuk data *supply* ini cenderung mudah didapatkan secara periodik.



Alur Metodologi Perhitungan Data Supply Demand Tenaga Kerja Konstruksi (Subdit Penerapan Kompetensi Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, 2017)

Selanjutnya adalah data kebutuhan (*demand*) tenaga kerja konstruksi, dimana untuk data ini cenderung sulit didapatkan. Data kebutuhan didapatkan dari menghitung berapa banyak tenaga kerja konstruksi yang terserap di proyek-proyek infrastruktur khususnya Kementerian PUPR dari tahun ke tahun, sehingga didapatkan *trend* kebutuhannya. Hingga hari ini belum ada satupun lembaga yang secara resmi melakukan sensus menyeluruh terhadap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek-proyek di lingkungan PUPR.

Hal ini tidak bisa dipungkiri, mengingat jumlah proyek konstruksi di PUPR sangat banyak dan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke daerah-daerah yang *remote area*. Bisa dibayangkan akan menghabiskan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Ken-

dala inilah yang kemudian, membuat beberapa unit kerja terkait di Kementerian PUPR dalam menghitung *demand* tenaga kerja konstruksi menggunakan asumsi atau mengolah dari data sekunder, bukan data primer yang langsung didapatkan dari lapangan.

Tercatat, Pusat Kajian Strategis (Pustra), Sekretariat Jenderal, Kementerian PU di tahun 2009-2010 pernah membuat kajian perhitungan kebutuhan tenaga kerja konstruksi dengan pendekatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Hasilnya adalah, setiap Rp 35 Triliun alokasi untuk pembangunan infrastruktur akan menyerap 1,2 juta tenaga kerja konstruksi atau jika disederhanakan, setiap Rp 1 triliun akan menyerap sekitar 34.000 tenaga kerja konstruksi. Hasil kajian Pustra inilah yang kemudian sering digunakan sebagai rujukan atau acuan, bahkan hingga hari ini.

Terobosan juga pernah dilakukan Ditjen Bina Konstruksi bekerjasama dengan Biro PAKLN Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, yaitu melakukan pendataan tenaga kerja konstruksi yang terserap di proyek-proyek Kementerian PUPR melalui aplikasi e-monitoring. Sebagaimana diketahui, e-monitoring adalah aplikasi yang cukup handal di Kementerian PUPR untuk mengetahui progres fisik dan keuangan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, termasuk proyek-proyek infrastruktur Kementerian PUPR. Setiap satker di PUPR diminta untuk menginput data-data terkait progres fisik, progres keuangan dan serapan tenaga kerja pada kegiatan/programnya ke aplikasi e-monitoring. Hasilnya didapatkan rata-rata sekitar 800 ribu sampai dengan 1 juta orang tenaga kerja konstruksi yang terserap di Kementerian PUPR tiap tahunnya. Namun, setelah didalami, banyak petugas satker yang menginput data tenaga kerjanya asal-asalan, dimana ASN atau aparatur pengguna jasa ikut diinput sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi. Belum lagi banyak satker yang tidak mengisi kolom serapan tenaga kerja, sehingga banyak data kosong.

Kajian selanjutnya yang terbilang baru, dirintis oleh Ditjen Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi di tahun 2017, yaitu dengan analisis harga satuan pekerjaan. Kementerian PUPR secara periodik telah mengeluarkan standar Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang didalamnya terdapat analisis terhadap kebutuhan bahan material, peralatan dan tenaga kerja konstruksi untuk setiap proyek. Data AHSP ini disandingkan dengan data RAB yang ada di dokumen penawaran yang diunggah penyedia jasa ke SPSE saat mereka melakukan proses lelang/tender.

Dengan jumlah proyek Kementerian PUPR yang rata-rata mencapai 30.000 proyek per tahun maka akan cukup sulit untuk menghitung dengan teknik sensus, sehingga yang akan digunakan adalah sampling terhadap proyek Kementerian PUPR tersebut. Secara umum proyek-proyek konstruksi di Kementerian PUPR dapat dibagi 4 (empat) kategori inti, yaitu proyek Bina Marga (BM), Cipta Karya (CK), Sumber Daya Air (SDA) dan Penyediaan Perumahan (PnP). Kemudian dari proyek-proyek Kementerian PUPR tersebut untuk

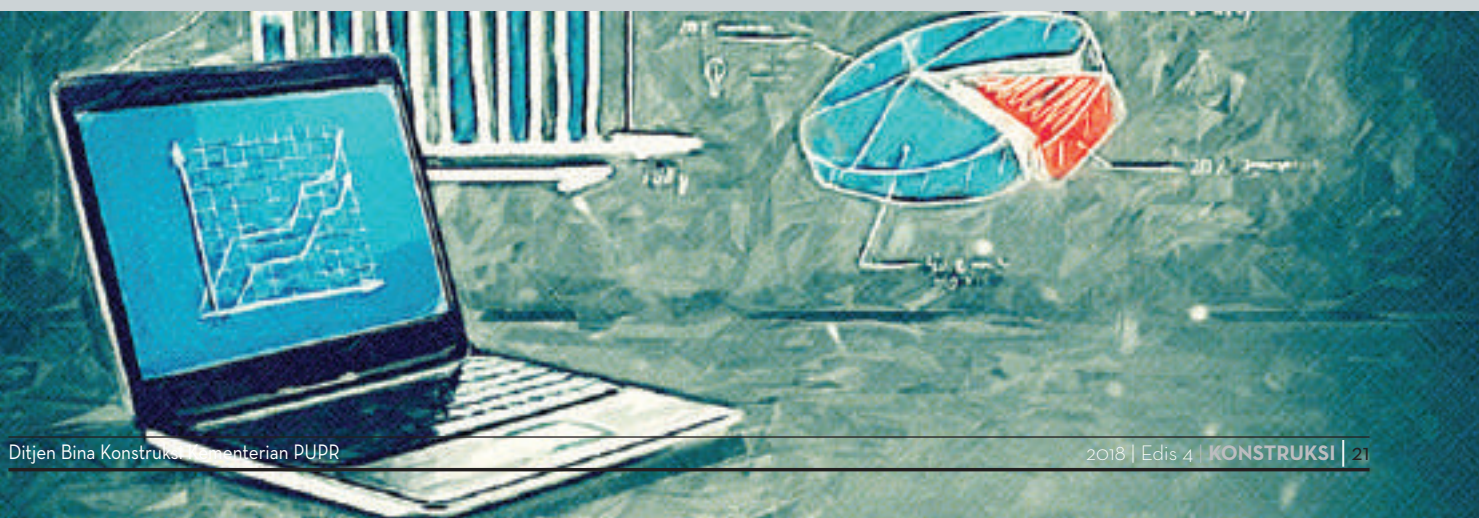
pekerjaan konstruksi dikelompokkan dalam *cluster* 0-2,5 milyar (kecil), 2,5-50 milyar (menengah), 50-100 milyar (besar I) dan >100 milyar (besar II).

Sedangkan untuk jasa konsultansi dikelompokkan dalam *cluster* 0-750 juta (kecil), 750 juta-10 milyar (non kecil I) dan >10 milyar (non kecil II). Masing-masing *cluster* tersebut dihitung dengan komponen AHSP yang kemudian akan diketahui jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk masing-masing *cluster*. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja konstruksi pada keseluruhan proyek maka perlu dilakukan justifikasi jumlah tenaga kerja konstruksi untuk proyek-proyek lainnya dalam satu *cluster*. Hasil analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang terserap di Kementerian PUPR (Tahun Anggaran 2014) dapat diketahui mencapai 1.046.968 juta orang/tahun dan jika dirasioikan dalam anggaran maka setiap Rp. 1 triliun akan menyerap 33.895 orang. Hasil analisis ini bahkan bisa didetailkan untuk mengetahui kebutuhan jumlah tenaga kerja konstruksi untuk setiap provinsi di Indonesia. Angka yang dihasilkan oleh kajian ini sebenarnya cukup dekat dengan hasil kajian Pustra sebagaimana disinggung sebelumnya. Hal yang cukup menarik dari kajian ini adalah dilakukannya validasi data dengan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. Hasil perhitungan di atas kertas akan dibandingkan.

Kajian terakhir yang disusun oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi di tahun 2017 ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendata kebutuhan tenaga kerja konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR yang lebih mendekati kondisi lapangan dengan pendekatan data-data sekunder. Oleh karena itu, sangat penting melanjutkan atau menyempurnakan kajian ini dengan beberapa catatan penting sebagai berikut:

- Jumlah sampel proyek yang dihitung diperbanyak variasi nya, sehingga seluruh jenis atau kategori infrastruktur pada berbagai tingkatan nilai proyek dapat ditemukan acuannya (*benchmark*);
- Perhitungan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada satu tahun anggaran saja, tetapi paling tidak tiga tahun anggaran, sehingga ditemukan *trendline* nya;
- Validasi data dengan kunjungan proyek tidak hanya pada satu proyek saja, tetapi pada seluruh variasi sampel proyek yang dihitung, sehingga didapatkan acuan/*benchmark* yang cukup valid.

Jika gagasan mengenai perhitungan data *demand* tenaga kerja konstruksi melalui pendekatan AHSP sebagaimana pernah dilakukan Ditjen Bina Konstruksi di tahun 2017 tersebut dapat disempurnakan dengan mempertimbangkan beberapa catatan di atas, niscaya kita akan dapat menjawab pertanyaan dari berbagai pihak mengenai berapa serapan tenaga kerja konstruksi di proyek-proyek infrastruktur Kementerian PUPR. Data yang kita dapatkan akan lebih valid dan menghilangkan asumsi berlapis yang sering kita gunakan untuk perhitungan. Mari Kita Wujudkan Bersama!



Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Lakukan Percepatan Uji Sertifikasi Operator Alat Berat di Perbatasan Negara Kalimantan Utara

✍ Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng

“...Proyek infrastruktur di perbatasan harus melibatkan masyarakat lokal. Dengan banyaknya proyek yang ada saat ini, kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Untuk itu, kompetensi para tenaga kerja konstruksi harus ditingkatkan...”

- Ir. Ober Gultom, MT.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah mengamanatkan bahwa setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Selain itu setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, Infrastruktur tidak hanya membutuhkan tenaga konstruksi dalam jumlah yang besar, tetapi juga harus terlatih, terampil dan bersertifikat. Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang dan arahan tersebut, Balai Material dan Peralatan Konstruksi melaksanakan Percepatan Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Operator Alat Berat di Kawasan Strategis Perbatasan Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau dan Bulungan, 2 s/d 4 Juli 2018. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di kawasan strategis perbatasan negara yang saat ini menjadi program prioritas Kementerian PUPR.

Sebanyak 121 orang operator alat berat yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dan para penyedia jasa yang sedang mengerjakan proyek-proyek strategis di wilayah Kabupaten Malinau dan Bulungan, diuji oleh para assessor dari LPJK Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai upaya dalam rangka percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, Uji Kompetensi Operator Alat Berat ini dilaksanakan secara *on site*, tanpa meng-

ganggu aktivitas para operator alat berat di lapangan. Percepatan uji kompetensi dilakukan secara observasi dan wawancara. Kegiatan ini dilaksanakan di proyek pembangunan jalan ruas Perbatasan Malinau – Long Bawan, Perbatasan Malinau – Mansalong, proyek pemeliharaan jalan di Pulau Sapi, Malinau, dan proyek saluran irigasi primer di Kawasan Sepunggur, Tanjung Selor. Jabatan kerja pada kegiatan percepatan uji kompetensi dan sertifikasi ini adalah operator excavator, bulldozer, motor grader, road roller, dump truck, dan operator Asphalt Mixing Plant dengan menggunakan alat berat yang sedang beroperasi di proyek.



Assesor sedang melaksanakan uji kompetensi di lokasi proyek Ruas Jalan Malinau – Long Bawan



Foto Bersama Dengan Perwakilan Peserta

Kabupaten Malinau dalam acara Pembukaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Operator Alat Berat di gedung aula Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

“Kami sangat berterimakasih karena dengan Uji kompetensi Operator Alat Berat ini, para operator alat berat bisa memiliki sertifikat, sehingga mereka lebih yakin dalam bekerja, percaya diri, dan hasil kerjanya pun optimal. Manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat” tuturnya.

Sementara itu, Ir. Ober Gultom, MT, Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah yang nyata untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga



Foto Bersama Dengan Para Peserta di Lokasi Proyek Irigasi Sepunggur



Uji Kompetensi Di Sepunggur, Bulungan

kerja konstruksi dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Pembangunan Infrastruktur saat ini diprioritaskan untuk membangun jalan, bendungan, jaringan irigasi, dan penyediaan perumahan, sehingga harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten, baik pengguna maupun penyedia jasa termasuk di dalamnya para operator alat berat. Wilayah Kalimantan Utara merupakan wilayah yang didominasi oleh hutan, gunung, dan sungai, sehingga dalam pekerjaan Infrastruktur pasti menggunakan alat berat dan diperlukan operator yang terampil.

“Proyek infrastruktur di perbatasan harus melibatkan masyarakat lokal. Dengan banyaknya proyek yang ada saat ini, kita

tidak boleh hanya menjadi penonton. Untuk itu, kompetensi para tenaga kerja konstruksi harus ditingkatkan” tegasnya. Beliau menambahkan bahwa kawasan perbatasan harus bisa bersaing, agar tidak tertinggal.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini antara lain Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Balikpapan XII, Kepala Subdit Penerapan Kompetensi Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Para Kasatker dan PPK Pelaksanaan Jalan Perbatasan, dan Balai Wilayah Sungai di wilayah Kalimantan Utara. Selanjutnya, percepatan uji kompetensi dan sertifikasi operator alat berat ini akan dilaksanakan di Sebatik, Kabupaten Nunukan serta di wilayah perbatasan negara lainnya.*

Pemerintah Dorong Peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Sektor Konstruksi

✍ Sri Sumarni, SH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada para Menteri agar menggunakan uang negara dengan efektif dan efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk bantu menyisir belanja pada setiap kementerian lembaga. Hal ini diungkapkan Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, *Detik Finance*, Selasa (30/5/2017). "Presiden juga menyampaikan bahwa kementerian lembaga harus menyisir kembali belanja-belanja yang sifatnya belanja barang," ungkap Sri Mulyani mengulangi yang disampaikan Jokowi.

Sektor konstruksi di Indonesia telah dan akan memberikan peluang yang besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Pemerintah saat ini juga mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana Program Nawacita Presiden RI, seperti pembangunan jaringan irigasi dan pembangunan waduk baru, konektivitas antar wilayah yaitu jalan nasional baru, peningkatan jalan arteri, jalan tol dan jembatan/flyover/underpass. Pembangunan perumahan untuk rakyat sebanyak 2,2 juta unit rumah dan pembangunan bandara, pelabuhan dan pembangunan jalur kereta api baru.

Pemanfaatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dari barang dan jasa dalam kegiatan infrastruktur mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kebutuhan industri penunjang konstruksi baik untuk kegiatan operasi hulu maupun hilir. Besarnya tingkat kebutuhan usaha penunjang konstruksi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat memberikan efek berantai (*multiplier effect*) bagi kegiatan perekonomian dalam negeri.

Berdasarkan pemberitaan yang dirangkum dalam laman website Kement-



rian PUPR, sejak tahun 2016-2017 Kementerian PUPR telah melakukan pengadaan sebanyak 58 unit *excavator* produksi PT. Pindad yang dikenal sebagai BUMN produsen peralatan pertahanan dan keamanan. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo tentang aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dimaksudkan untuk memperkuat Industri Nasional, membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

Penggunaan sumber daya dalam negeri pada produk barang, sumber daya manusia dan teknologi diutamakan dalam Pembangunan Infrastruktur. Pembelian *excavator* PT. Pindad oleh Kementerian PUPR merupakan implementasi nota kesepahaman yang ditandatangani antara Kementerian PUPR dan PT. Pindad pada 10 September 2015 lalu, bersamaan dengan peluncuran produk *excavator* "Pindad Excava 200" yang dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Ini adalah komitmen Pemerintah memaksimalkan sumber daya dalam negeri, salah satunya penggunaan *excavator* produksi PT. Pindad," tutur Menteri Basuki.

Sebanyak 20 *excavator* Pindad senilai Rp 34,4 miliar dibeli Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya tahun 2017

dan telah dihibahkan kepada kabupaten/kota untuk mendukung operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

Kabupaten yang menerima yakni Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Morotai, Poso, Bantaeng, Lembata, Sumbawa Barat, Sukamara, Balangan, Sleman, Tasikmalaya, Sampang, Muara Enim, Bogor, Magetan, Ngawi, Gunung Kidul, Sleman. Untuk kota yakni Kota Banda Aceh, Surabaya, dan Makassar.



Kemudian di Ditjen Bina Marga dilakukan pembelian sebanyak 22 unit pada tahun 2017 dan 16 unit pada tahun 2016. Alat berat tersebut digunakan untuk pemeliharaan jalan nasional, antara lain di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara itu di Tahun 2018 akan kembali dilakukan pembelian sebanyak 10 unit excavator Pindad.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. Pindad Abraham Mose mengapresiasi dukungan dan kepercayaan Kementerian PUPR menggunakan produk alat berat buatan dalam negeri. "Terimakasih atas kepercayaan dan dukungan Kementerian PUPR yang secara bertahap membeli Pindad Excava 200 ditengah banyaknya produk sejenis dari luar negeri. Kami yakin kualitas *ekscavator* kami sangat baik, dapat diandalkan dan tidak kalah dengan produk buatan negara lain," kata Abraham.

Pembelian excavator PT. Pindad oleh Kementerian PUPR merupakan implementasi nota kesepahaman yang ditandatangani antara Kementerian PUPR dan PT. Pindad pada 10 September 2015



Tidak hanya di sektor teknologi alat berat, Pemerintah juga menetapkan kebijakan pemanfaatan produksi dalam negeri pada kegiatan infrastruktur antara lain :

1. Menetapkan *road map* penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha konstruksi untuk Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang;
2. Mewajibkan pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri apabila: barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta memenuhi kualitas mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa;
3. Melakukan pembinaan terhadap kemampuan produksi dalam negeri dan dapat menerbitkan media apresiasi produksi dalam negeri, sebagai acuan pengendalian impor barang operasi dan pengadaan barang dan jasa;
4. Melakukan pengawasan atas penggunaan produksi barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang digunakan pada kegiatan infrastruktur.
5. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada Kontraktor dan penyedia barang/jasa dalam negeri berdasarkan kebijakan penggunaan barang/jasa produk dalam negeri dan capaian TKDN yang telah dilaksanakan.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi mulai merumuskan kerangka rancangan Peraturan Menteri tentang Pendayagunaan TKDN usaha jasa konstruksi yang meliputi 6 aspek yaitu lingkup proyek konstruksi, komitmen dan verifikasi capaian TKDN, Pedoman Perhitungan TKDN Proyek Konstruksi, Verifikator, Pembentukan Tim P2DN di Kementerian PUPR hingga sanksi (*reward and punishment*) terhadap pengguna ataupun penyedia jasa. Bentuk perangkat yang digunakan berupa Perhitungan Mandiri (*Self Assessment*) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Penyedia barang dan/atau jasa untuk melakukan penilaian Terhadap nilai TKDN melalui analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan serta menggunakan pedoman ini sebagai acuan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 ayat (1) : kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi dan ayat (2) dijelaskan sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal

Pemanfaatan TKDN dari barang dan jasa dalam kegiatan infrastruktur mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kebutuhan industri penunjang konstruksi hulu maupun hilir.

dari produksi dalam negeri. Kemudian dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 76 dijabarkan bahwa ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 1. Pencapaian TKDN dan 2. Penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya dalam Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Tentang Bentuk Rancangan Kontrak Hak dan Kewajiban Para Pihak untuk melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK.

Demi meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri penyedia barang/jasa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR mengadakan Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi pengguna jasa regional Kalimantan di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada 26-27 Juli 2018 lalu.

Melalui kegiatan ini dapat diberikan pengetahuan dan keterampilan profesional untuk memahami konsep, filosofi, serta metode aplikasi dan manfaat penerapan komponen dalam negeri dan cara menghitung TKDN pada suatu pelaksanaan kegiatan. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Bastian Sihombing juga mengatakan peraturan TKDN yang sudah ada dapat dipahami dan diterapkan di unit organisasi serta mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan unit organisasi untuk penerapan TKDN.

Diharapkan melalui pelatihan ini dapat diketahui secara mandiri dan cepat tingkat pencapaian awal dan merancang langkah tindak lanjut untuk peningkatannya, membantu dalam menyusun alternatif rencana investasi dan pemilihan pemasok agar TKDN dapat dicapai secara tepat waktu dan efisien.*



Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Melalui Pola Kuliah Kerja Nyata Tematik Infrastruktur

✍ Niken Dwi Pramesti

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan pengangguran. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), di mana program ini diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui program ini, Pemerintah memberikan porsi besar bagi masyarakat untuk aktif di pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga mengurangi kesenjangan antarwilayah dalam upaya pemerataan pembangunan. Program padat karya sebagian besar mencakup program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)/Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TAI) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program padat karya tahun 2018 dirancang untuk mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja. Hal ini merupakan potensi untuk pencetakan tenaga kerja baru, khususnya bidang konstruksi. Untuk dapat menciptakan masyarakat sebagai tenaga kerja konstruksi yang kompeten, dapat dilakukan dengan pelatihan dan uji kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi (SKKNI) yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pelatihan yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagai tenaga kerja konstruksi adalah dengan penyelenggaraan Pelatihan Konstruksi bagi Penerima Pro-

gram Infrastruktur Berbasis Masyarakat.

Di sisi lain, lokasi program padat karya ini terletak di seluruh pelosok Indonesia hingga meliputi kabupaten/kota. Untuk dapat melatih seluruh pelaksana program padat karya bukanlah tugas yang mudah. Strategi untuk mengatasi kendala ini, salah satunya menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi dalam rangka menyelenggarakan program pendampingan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat melalui pola Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan wadah interaksi antara maha-



siswa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya. Masih cenderung dilihat dari aspek kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan program studi. KKN sejatinya seperti mata kuliah yang lain, lebih terfokus pada nilai dan manfaat bagi mahasiswa. Namun diperlukan perubahan sudut pandang bahwa Kuliah Kerja Nyata dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat, khususnya terkait bidang infrastruktur berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam meningkatkan peran perguruan tinggi untuk membantu penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat, Kementerian PUPR bersama dengan 22 (dua puluh dua) Perguruan Tinggi, telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018, di Jakarta. Adapun 22 (dua puluh dua) Perguruan Tinggi, yakni Universitas Syiah Kuala,

Dengan memahami manfaat langsung infrastruktur bagi masyarakat, mahasiswa diharapkan dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dasar. Program KKN ini sudah terlaksana sejak 2014 namun masih terbatas pada bidang Cipta Karya. Pada tahun 2018 ini, pelaksanaan program KKN Tematik Infrastruktur akan ditingkatkan ruang lingkup kerja sama meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Pembiayaan Perumahan, Bidang Penyediaan Perumahan dan Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Terkait pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, pelaksanaan kerja sama meliputi keterlibatan peran mahasiswa Perguruan Tinggi dalam melakukan peningkatan kapasitas pelaksana infrastruktur berbasis masyarakat.



Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Universitas Bangka Belitung, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Semarang, Universitas Trunojoyo, Institut Pertanian Bogor, Universitas Palangka Raya, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Manado, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Gorontalo, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Khairun, Universitas Negeri Papua, Universitas Cendrawasih. Pelaksanaan kerja sama dengan 22 (dua puluh dua) Perguruan Tinggi ini akan baru aktif dilaksanakan pada tahun 2019.

Pelaksanaan kerja sama ini ditujukan agar mahasiswa dari Perguruan Tinggi dapat dimanfaatkan untuk menjadi agen-agen Pemerintah dalam membantu pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

tukang/mandor pada pelaksanaan infrastruktur berbasis masyarakat.

Sementara itu, sosialisasi pemahaman tentang Kesehatan, Keselamatan, Kerja merupakan faktor yang penting dalam pembangunan infrastruktur sederhana berbasis masyarakat. Meskipun tergolong pekerjaan proyek konstruksi sederhana, namun masyarakat tetap perlu memperhatikan aspek-aspek keamanan kerja. Pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan-aturan K3, serta bahaya yang mungkin ditimbulkan akibat aktivitas-aktivitas pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam konteks sederhana dan mudah dipahami, menjadi tugas para peserta dalam KKN Tematik infrastruktur bidang pembinaan jasa konstruksi.

Selanjutnya, untuk mendukung keterlibatan perguruan tinggi dalam mempromosikan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dosen dan Mahasiswa untuk keberlanjutan infrastruktur berbasis masyarakat, Ditjen Bina Konstruksi menyiapkan dukungan meliputi modul-modul pelatihan dasar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun konstruksi sederhana sebagai fasilitas desa, *Mobile Training Unit* (MTU) yang akan digunakan untuk memfasilitasi pelatihan masyarakat.

Kedepannya, kerja sama tidak hanya sebatas membekali para mahasiswa dan dosen pembimbing untuk pemberdayaan masyarakat, namun ruang lingkup akan diperluas dengan pencetakan para calon-calon tenaga ahli muda dalam bentuk sertifikasi kompetensi serta program-program *link and Match* Perguruan Tinggi dengan Dunia Industri.

Akhir kata, tugas pembentukan SDM tidak hanya menjadi tugas Pemerintah saja, melainkan tugas bersama baik Lembaga Pendidikan, maupun seluruh aspek masyarakat. Melalui KKN Tematik Infrastruktur, Pemerintah tidak hanya mendorong kemampuan mandiri suatu masyarakat desa/kelurahan dalam membangun sistem penyelenggaraan infrastruktur melainkan turut mendorong pencetakan sumber daya manusia terutama generasi muda yang berkualitas dalam membangun infrastruktur.*

“Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan kunci menuju Pembangunan infrastruktur berkualitas”

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Perlu Ketersediaan Sumber Daya Konstruksi Yang Berkualitas

✍ Kristinawati Pratiwi Hadi

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyampaikan paparan terkait Penyelenggaraan Konstruksi 2019 pada Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian PUPR TA 2018 yang mengambil tema 'Sigap Membangun Negeri', Selasa (7/8) di Jakarta. Materi yang disampaikan pada Rakertas Pertama Kementerian PUPR ini meliputi : Gambaran Pemaketan, Kesiapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Persiapan Pengadaan dan Lelang Dini, dan Komite Keselamatan Konstruksi & Klinik Konstruksi.

Menurut Dirjen Bina Konstruksi, kondisi sumber daya konstruksi dalam hal ini tenaga kerja konstruksi dan ketersediaan material serta peralatan di tahun 2018, masih belum memadai. Untuk itu peran Balai Jasa Konstruksi perlu ditingkatkan agar percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dapat segera dilaksanakan.

Dalam hal pemaketan, disampaikan bahwa secara umum, jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) saat ini yang terdaftar jauh lebih banyak dari jumlah paket pekerjaan yang tersedia. "Dari 1.934 paket pekerjaan konstruksi yang bernilai di bawah 2,5 Milyar, diikuti oleh 110.441 BUJK kualifikasi kecil. Hal ini menunjukkan adanya gap yang tinggi dalam hal ketersediaan paket pekerjaan dengan kemampuan BUJK kita", ujar Syarif.

Dominasi BUMN pada pekerjaan konstruksi periode 2015 s.d. 2018 juga masih terjadi. Data menunjukkan bahwa paket pekerjaan dengan nilai dibawah 100 M didominasi oleh Swasta sedangkan yang bernilai diatas 100 M didominasi oleh

BUMN. Meskipun demikian, secara keseluruhan, di tahun 2018 ini swasta masih mendominasi paket-paket pekerjaan konstruksi.

Syarif mengingatkan bahwa dalam pemaketan pekerjaan harus mempertimbangkan kondisi rantai pasok dalam hal ini material, alat, tenaga kerja, dan BUJK. Sedangkan untuk mendorong peningkatan kapasitas BUJK, didorong agar Pemaketan diatas 100 Milyar, untuk pekerjaan penunjang di subkon-kan ke BUJK kecil, sedangkan untuk pekerjaan utama di subkon-kan ke BUJK Spesialis.

Untuk persiapan lelang dini di tahun 2019, seluruh Satker dan Pokja harus memahami pokok-pokok yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar proses lelang dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai kaidah. Sedangkan terkait perubahan ULP menjadi UKPBJ, perubahan yang harus diperhatikan adalah bahwa PPK yang menyerahkan paket-paket pekerjaan yang akan dilelang kepada UKPBJ, bukan Satker sebagaimana sebelumnya.

Terkait penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Syarif mengingatkan bahwa K3 harus dipastikan muncul dalam Biaya Umum dan menjadi syarat lelang, yaitu dalam 1-2,5% dari nilai pekerjaan atau sesuai kebutuhan. Selain itu, berdasarkan hasil review kasus kecelakaan konstruksi yang terjadi beberapa waktu

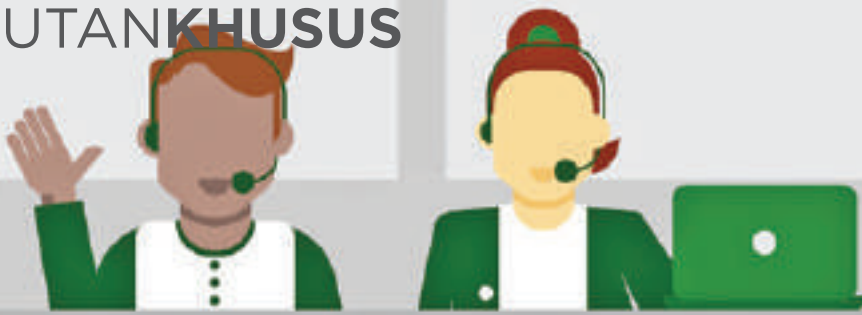
lalu, dapat dilihat bahwa kedisiplinan pada SOP harus dilakukan. Selain bahwa jadwal *shifting* pekerja harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk kemampuan pekerja itu sendiri.

"Kelaikan peralatan juga harus diperhatikan dan jangan hanya memperhatikan tahun pembuatan. Untuk itulah yang harus dilihat adalah SILO atau standarisasi, kalibrasi, dan masa layanan peralatan. Disinilah perlunya konsultan pengawas pada proyek konstruksi", ungkap Dirjen Bina Konstruksi.

Terakhir, Syarif menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia Klinik Konstruksi yaitu layanan konsultasi konstruksi yang telah resmi *dilaunching* sejak 1 Agustus 2018. Layanan ini akan memberikan bantuan pada berbagai masalah terkait penyelenggaraan konstruksi melalui tatap muka maupun *online*. (tw)

Peran Balai Jasa Konstruksi perlu ditingkatkan agar percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dapat segera dilaksanakan.





MENGENAL LEBIH DALAM HAKIKAT PELAYANAN PUBLIK

✍ Kristinawati Pratiwi Hadi dan Mirza Anindita

Pernahkah anda merasakan menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau menunggu dalam kondisi letih ketika berobat ke dokter menggunakan BPJS? Bagi yang pernah mengalaminya tentu sangat memahami kebutuhan pelayanan publik yang baik. Pelayanan yang ramah terhadap rakyat yang membutuhkan dengan tanpa melukai hak-hak satu sama lain dan tentunya ramah.

Presiden RI Joko Widodo sendiri pernah berujar bahwa rakyat masih banyak mengeluh bahwa yang pelayanan di instansi pemerintah sering identik dengan kurang cepat atau lambat, berbelit-belit dan kurang ramah. Tentunya ini bisa jadi persepsi sebagian pihak, namun dengan banyak keluhan yang terjadi harus ditanggapi dengan serius. Sebab instansi pemerintah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, atau yang lazim disebut dengan pelayanan publik, sangat menentukan maju tidaknya kinerja bangsa.

Apalagi di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin kritis dan semakin tahu hak-haknya. Bukan tidak mungkin, jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah dan memperbaiki diri, menurut Presiden RI, sentra-sentra pelayanan itu akan ditinggal oleh rakyat. Yang juga bukan tidak mungkin akan kalah bersaing dengan pelayanan yang diberikan oleh sentra-sentra pelayanan bisa saja dimiliki oleh asing.

Kuncinya, tegas Presiden, adalah kemauan. Kemauan untuk berubah, kemauan untuk memperbaiki, kemauan untuk membenahi karena keterbukaan dalam persaingan bukan hal yang perlu kita takuti. Dengan demikian perlu peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraan.

Sebagai Aparat Sipil Negara, sejatinya melayani masyarakat adalah panggilan jiwa yang telah mengalir dalam setiap sendi sanubari. Dari staf yang paling bawah tingkatannya hingga pimpinan tertinggi, harus menjunjung tinggi prinsip dasar melayani.

Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 1, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senantiasa melaksanakan pelayanan publik secara maksimal. Hal ini terbukti pada tahun 2000 menjadi kementerian pertama yang menjadi pelopor penerapan pengadaan barang dan jasa secara *online*. Kemudian di bidang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Kementerian PUPR tidak pernah lepas dari sepuluh besar kementerian yang memberikan layanan informasi publik terbaik. Dan yang termutakhir, di tahun 2017, Kementerian PUPR meraih Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dengan unit layanan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) Konstruksi.

Tidak berhenti sampai di sana, Kementerian PUPR terus mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik, sesuai dorongan dari Kementerian PAN dan RB melalui kebijakan “*One Agency, One Innovation*”, yaitu setiap kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib menciptakan minimal 1 (satu)

LAPORANKHUSUS

inovasi pelayanan publik setiap tahun. Sinovik di tingkat Kementerian PUPR saat ini sedang berlangsung, yang diharapkan bibit-bibit semangat dan kreativitas pelayanan publik akan lahir, untuk kemudian diikutsertakan di Sinovik tingkat Nasional tahun 2019 nanti.

Jika demikian adanya di Kementerian PUPR, bagaimana pelayanan publik di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi? Balai merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di daerah. Oleh karena itu, tugas pelayanan publik harus berjalan untuk melayani masyarakat daerah. Kami mengunjungi beberapa balai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk melihat bagaimana berjalannya pelayanan publik di daerah. Dari kunjungan tersebut, didapati bahwa masing-masing balai sudah memiliki pemahaman mengenai standar pelayanan publik.

Contohnya di Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh, salah satu permintaan yang kerap diajukan masyarakat terkait pelatihan tenaga kerja konstruksi. Masyarakat di daerah sekitar tak perlu ragu untuk menyampaikan pengaduan maupun permohonan informasi, dikarenakan ASN di Balai Jasa Konstruksi siap membantu. Ketersediaan informasi pelayanan publik non-elektronik seperti *booklet* dan pamflet pun telah tersedia.



Selain itu, kami juga mengunjungi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Di sana, balai menyediakan sarana berupa ruangan khusus untuk menerima masyarakat yang datang untuk meminta informasi maupun memberikan pengaduan. Ruangannya dilengkapi dengan meja dan kursi untuk interaksi, komputer serta papan tulis

untuk keperluan pelayanan publik. Jika ada masyarakat yang datang ke balai, akan diarahkan untuk menemui Kepala Seksi Perencanaan dan Informasi.

Sebagai Aparat Sipil Negara, sejatinya melayani masyarakat adalah panggilan jiwa yang telah mengalir dalam setiap sendi sanubari. Dari staf yang paling bawah tingkatannya hingga pimpinan tertinggi, harus menjunjung tinggi prinsip dasar melayani. Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Adapun standar pelayanan yakni meliputi: *Prosedur pelayanan* yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan; *Waktu penyelesaian* yaitu waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan; *Biaya pelayanan* yaitu biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan; *Produk pelayanan* yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan

dan perilaku yang dibutuhkan.

Mengacu pada pelayanan publik di tingkat global, Kanada, Selandia Baru dan Australia menjadi negara-negara dengan pelayanan publik paling efektif di dunia menurut The International Civil Service Effectiveness Index (InCiSE). Sebanyak 31 negara dinilai keefektifan pelayanannya yang dilihat dari aspek: administrasi pajak, inklusivitas, kapabilitas, keterbukaan, integritas, manajemen SDM, krisis/ manajemen risiko, regulasi, manajemen fiskal dan keuangan, layanan digital, administrasi keaman sosial dan pembuatan kebijakan.


Sedangkan menurut Moenir (2005:197), agar layanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka si pelaku dalam hal ini petugas, harus dapat memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu: tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan dan waktu penyampaian.

Melalui tingkah laku yang sopan, masyarakat atau orang yang dilayani merasa dihormati dan dihargai, dengan demikian sudah merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi yang bersangkutan. Sedangkan cara menyampaikan juga menjadi catatan tersendiri, sebab terkadang orang yang kita layani berbeda-beda baik dari sisi usia, latar belakang budaya, agama dan sebagainya. Seyogyanya, ASN mampu menempatkan diri untuk menyampaikan informasi sesuai kondisi masyarakat yang dilayani. Waktu penyampaian berhubungan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada masyarakat akan berapa lama suatu layanan diselesaikan.



ketentuan yang telah ditetapkan; *Sarana dan prasarana* yaitu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik; serta *Kompetensi petugas pemberi pelayanan* yaitu kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap

Pemberdayaan Pejabat Fungsional Untuk Menjadi *Coach*

 Syarkowi

Keberhasilan berbagai program Pembangunan Infrastruktur sangat tergantung pada Kualitas Sumber Daya Konstruksi. Sumber Daya Konstruksi tersebut terdiri dari empat komponen utama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, Material dan Peralatan Konstruksi. Lebih spesifik lagi, Sumber Daya Manusia tersebut dapat dinilai dari hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai pegawai persatuan waktu tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau tanggung jawab yang di embannya.

Mengingat pentingnya Pengelolaan SDM tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui ***Coaching dan Mentoring*** pada tanggal 6 -7 April 2018 di Bogor.

Pelaksanaan kegiatan *Coaching and Mentoring* tersebut merupakan salah satu aspek pembinaan kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan kebijakan program strategis. Melalui ***Coaching and Mentoring*** ini dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam kegiatan sehari-hari. Untuk menindaklanjutinya telah dilakukan Pembekalan Teknik ***Coaching For Performance***, baik untuk Pejabat Struktural maupun Fungsional.

Dijelaskan oleh Organisasi *Coaching* dunia, (*International Coach Federation (ICF)*), *Coaching* merupakan hubungan **kemitraan** dengan individu melalui **proses kreatif** untuk **memaksimalkan potensi** personal dan Profesionalnya, yang artinya *Coach* (*Pemberi Coaching*) dan *Coachee* (orang yang menerima *coaching*) bekerja bersama untuk mencapai **Goal** (tujuan) yang di sepakati.

Dimana di dalamnya terdapat percakapan dua arah yang melibatkan pemetaan, penggalan dan munculnya ide-ide kreatif. Ide yang lahir ditindak lanjut dalam bentuk **action plan** yang akan dijalankan oleh *coachee* agar potensinya bisa termaksimal secara nyata.

Coaching tidak sama dengan mengajar dan memberi instruksi, justru memberikan

solusi dalam proses *Coaching* merupakan hasil pemikiran bersama antar *Coach* dan *Coachee*. Jadi prinsip utama *Coaching* adalah bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh *Coachee*. Untuk itu dibutuhkan kemampuan seorang *Coach* untuk merangsang pemikiran *Coachee* agar ia dapat memunculkan ide-ide yang akan di implementasikan dalam sebuah rencana tindakan.

Kementerian PUPR sangat menyadari hal tersebut di atas, untuk itu dilakukan Program ***Coaching dan Mentoring*** dalam rangka pembinaan insan PUPR mulai dari Pegawai CPNS baru, hingga staf pendukung yang telah lebih dinamis dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, sebagian pembaca buletin Ditjen Bina Konstruksi mungkin ada yang belum mengetahui apa itu *Coaching for Performance*, apa peran Pejabat Fungsional untuk berkontribusi dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Ditjen Bina Konstruksi?

Saat ini banyak Perusahaan maupun Instansi Pemerintah mendorong manajernya atau pimpinan di bidangnya untuk menerapkan *Coaching* dengan harapan akan adanya peningkatan Kinerja (*Performance*) SDM -- *bagi individu-individu yang memiliki level kompetensi yang bervariasi --*, sekaligus akan terciptanya hubungan antar individu yang lebih baik.

Di era zaman *Now*, ketika hampir semua atasan harus memimpin anak muda yang *notabene* generasi *milineal*, maka menjadi *coach* sudah menjadi sebuah kebutuhan.

Untuk itulah peran coach dan mentor juga dimaksimalkan pada Pembinaan CPNS Angkatan 2017. Untuk diketahui, para generasi muda PUPR angkatan 2017 semuanya adalah pejabat fungsional jenjang pertama. Terdapat sebanyak 998 CPNS baru angkatan 2017, dimana 23 CPNS tersebut ditugaskan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, namun karena satu orang mengundurkan diri, tersisa 22 orang CPNS. Mereka mendapatkan program *choacing and mentoring* dalam pendidikan dasar (Latsar), dimana sebagai mentornya adalah para pejabat struktural. sedangkan sebagai coach, pada umumnya adalah para pejabat fungsional.

Telah dilakukan Pelatihan Pembelajaran Dasar (Latsa) CPNS yang merupakan suatu proses yang memadukan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan CPNS mampu menginternalisasi, menerapkan dan mengaktualisasikan serta membuatnya menjadi kebiasaan (*habituasi*).

Latsa CPNS ini sebagai satu jenis pelatihan yang strategis paska UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan





bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural. Pelaksana pembimbing telah dimulai sejak CPNS berada di unit organisasinya masing-masing, dalam rangka pengenalan yang lebih mendalam terhadap tugas dan fungsi unit kerja tempat CPNS tersebut berada.

Peran *Coach dan Mentor* sangat penting dalam pencapaian tujuan. Untuk itu *Coach dan Mentor* seharusnya memiliki karakter yang ideal seperti empati, perspektif, fokus yang jelas, intuisi, obyektif dan kekuatan untuk memberi tantangan kepada *coachee*. Disamping itu, haruslah mempunyai keterampilan yang harus dimiliki antara lain keterampilan mendengarkan, mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi sesuai dengan tujuan, strategi dan tindakan.

Para atasan di unit kerja tidak lagi sekedar mengelola pekerjaan yang menjadi Tugas dan fungsinya, namun juga di harapkan menjadi *Leader dan Coach* yang mampu memimpin Timnya melalui pendekatan proses *Coaching* yang berkolaborasi. Misalnya dalam penyelesaian masalah, tidak lagi bergantung pada satu orang, melainkan melalui proses fasilitasi yang melibatkan partisipasi individu di tempat kerjanya. Menjadi **atasan** sekaligus **Coach**, artinya fokus kepada staf dengan memperhatikan aspek pengetahuan yang mereka miliki, harapan dan tantangan yang dihadapi dan dengan tulus menyediakan diri untuk pendampingan dalam proses pengembangan dirinya sebagai individu-individu yang di harapkan menjadi pemimpin baru di organisasi pada masanya.

Salah satu dampak *coaching* di organisasi yang paling nyata adalah meningkatnya Kinerja (*Performance*), selain itu juga menguatnya hubungan antar pegawai. Kinerja di lingkungan kerja mengacu pada kemampuan setiap individu untuk menyelesaikan aktifitas secara baik dan konsisten.

Untuk memastikan *performance* di lingkungan kerja tersebut tercapai, maka *coaching* diberikan kepada pegawai yang dibagi menjadi 2 (dua) katagori:

- Pertama: Individu yang diidentifikasi memiliki *gap* atau kekurangan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya. Di konteks ini *coaching* di berikan untuk membekalnya dengan kompetensi yang di dibutuhkan untuk menguatkan perilakunya (*behavior*) yang mendukung pencapaian tujuan.
- Kedua, individu yang sudah mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. *Coaching* tetap diberikan dengan tujuan memfasilitasi ide-ide pengembangan dan menyediakan kesempatan yang lebih luas bagi dirinya untuk memaksimalkan potensi.

Dewasa ini, prinsip-prinsip *Coaching* sudah menjadi hal yang sangat penting dalam kepemimpinan dan manajemen dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat dan munculnya generasi

milennial-generasi Y yang hidup dan kehidupannya sesuai zamannya.

Kemampuan *Coaching* dapat melengkapi kita baik sebagai atasan maupun Pejabat Fungsional untuk memfasilitasi perubahan orang lain – insan PUPR umumnya dan pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi-khususnya, melalui kesadaran dalam dirinya. Pendekatan *coaching* yang manusiawi menempatkan para Pegawai sebagai individu apa adanya dengan segala keterbatasan, kekuatan dan potensi yang mereka miliki untuk peningkatan Kinerjanya.

Dalam program **Leader as Coach, : Coaching For Performance**, maka Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang senior, dapat mengambil peran atau di berdayakan oleh Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.*

Melalui *Coaching and Mentoring* ini dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam kegiatan sehari-hari. Untuk menindaklanjutinya telah di lakukan Pembekalan Teknik *Coaching For Performance*, baik untuk Pejabat Struktural maupun Fungsional.



GEN DAN GENERASI DJBK

✍ Meylina Hasbullah

Bekerja di Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR? Termasuk generasi manakah kita? Pernah mendengar generasi milenial atau generasi x dan generasi *baby boomers*?

Berada di Ditjen Bina Konstruksi, kita akan merasakan adanya kerjasama sekaligus di saat yang sama kesenjangan akibat interaksi dari beberapa generasi dalam menyelesaikan output pekerjaan tiap harinya. Mereka sama-sama menggunakan seragam putih dan *nametag* berlogo PUPR namun terlihat perbedaan gaya, tingkah laku, cara kerja dan cara komunikasi.

Kementerian PUPR tidak setiap tahun merekrut pegawainya. Bahkan, ada masa moratorium selama beberapa waktu yang menyebabkan tidak adanya proses penerimaan pegawai. Akan tetapi tiap tahun selalu ada sejumlah besar pegawai yang pensiun. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini, alokasi anggaran, program kerja dan target

pencapaian Kementerian PUPR semakin bertambah secara signifikan.

Di akhir tahun 2017 lalu, kembali ada perekrutan pegawai dalam jumlah besar di Kementerian PUPR. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini terdiri dari generasi yang lahir pada tahun 1981-2000 yang biasa disebut Generasi Y atau Generasi Millennial. Ciri yang paling terlihat adalah terbiasanya generasi ini mendapatkan informasi secara cepat. Hal ini mengingat, mereka tumbuh dewasa di era digital, dimana komputer dan *Handphone* dengan segala jenis bentuknya seperti serta sambungan internet adalah sama dengan kebutuhan primer.

Berkisar di usia 20-30 tahun, Generasi Y terhitung baru memasuki dunia kerja. Generasi Y cenderung bertanya dan meminta kritik serta saran untuk kemajuannya. Mereka menganggap bahwa *rewards* terbaik adalah perasaan ketika pekerjaannya dinilai berarti bagi hal-hal tertentu. Keseimbangan

gaya hidup dan pekerjaan menjadi hal yang paling penting. Karenanya, mereka cenderung mencari pekerjaan yang dapat menunjang gaya hidup.



Sebagai senior atau atasan dari Generasi Milenial tersebut, adalah Generasi X yang lahir pada tahun 1961-1980. Generasi X lahir pada masa adanya gejolak dan transisi serta menyaksikan berbagai konflik global seperti Perang Dingin, Perang Vietnam, jatuhnya Tembok Berlin, Peristiwa 911. Dalam negeri, mereka tumbuh dewasa saat peralihan Orde Baru ke Reformasi serta merasakan perbedaan kepemimpinan dari beberapa Presiden di Indonesia. Generasi ini cenderung lebih toleran, menerima berbagai perbedaan yang ada.

Selain itu, dari segi teknologi informasi, Generasi X mulai mengenal yang namanya komputer sehingga generasi ini mulai berpikir secara inovatif untuk mempermudah kehidupan manusia. Mereka generasi yang memanfaatkan pita kaset, disket, cd hingga *flash disc* dalam kehidupannya. Cenderung suka akan risiko namun diiringi pengambilan keputusan yang matang adalah bagian dari ciri mereka.

Generasi X sangat terbuka dengan kritik dan saran agar lebih efisien dalam bekerja. Pandangan mereka adalah bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja sehingga kehidupan antara pekerjaan, pribadi, dan keluarga cenderung seimbang.

Selain itu, ada juga Generasi *Baby boomers* yang lahir sebelum tahun 1960 dan telah berada di Kementerian PUPR selama beberapa dekade. Mereka adalah generasi yang telah menjabat di posisi atas, yang mengeluarkan kebijakan, dan akan pensiun dalam waktu dekat. Generasi ini terlahir pada masa-masa dimana berbagai perang telah berakhir sehingga perlu penataan ulang kehidupan dan keluarga yang memiliki banyak anak. Di samping itu, perekonomian dan pertumbuhan penduduk sedang mulai meningkat. Adat istiadat masih dipegang teguh dan bahasa *slang* belum berkembang. Generasi *Baby boomers* cenderung “hati-hati” dan sangat matang dalam pengambilan keputusan. Mereka tumbuh dewasa dengan televisi hitam putih dan radio.

Generasi *Baby Boomers* cenderung tidak suka menerima kritik. Generasi ini menganggap bahwa hidup untuk bekerja. Namun demikian, loyalitas dan dedikasi dalam bekerja menjadi poin positif bagi *Baby Boomers*.

Setidaknya ada 5 generasi yang ada dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini. Dengan sekian banyak harapan dan tanggung jawab yang dibebankan di pundak

Ditjen Bina Konstruksi, roda pergerakan SDM nya adalah di 3 lintas generasi saat ini. Mereka yang sedang berada di dalamnya, berinteraksi mengemban tugas negara demi pembinaan jasa konstruksi di Indonesia.

Budaya kerja organisasi turut berperan dalam manajerial lingkungan kerja itu sendiri. Ibarat gen di DNA yang mengendalikan ciri genetika makhluk hidup, budaya kerja organisasi dibawa dan diturunkan ke penerus berikutnya. Budaya kerja organisasi ini ada yang merupakan warisan dari sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan zaman.

Perombakan organisasi, promosi dan rotasi, rekrutmen pegawai ASN tiap unit organisasi, membawa kebiasaan masing-masing yang perlu dilebur dan direkatkan kembali dalam bentuk pelatihan, outbond, sosialisasi tentang Ditjen Bina Konstruksi. Bagaimanapun juga, *‘dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung’*.

Tiap generasi memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing, yang apabila diantisipasi dengan bijak akan menghasilkan perpaduan yang mumpuni.

Termasuk generasi yang manakah Anda?
(dari berbagai sumber)





KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Sukseskan

Asian Games XVIII

INDONESIA, 18-8-18





Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat



**KONSTRUKSI
INDONESIA**

31 Oktober - 2 November 2018

Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Indonesia



Lembaga
Pengembangan
Jasa Konstruksi
Nasional

GRATIS!
**SERTIFIKASI
PEKERJA
TERAMPIL
KONSTRUKSI**

Daftar kunjungan
gratis Anda
sekarang juga!



PEMANFAATAN PELUANG BISNIS KONSTRUKSI DI INDONESIA



200
PESERTA PAMERAN



12,965sqm
TOTAL AREA PAMERAN



12,000
KEY BUYERS



7,000
PESERTA SERTIFIKASI



33
SERI WORKSHOP

Diorganisir oleh



Rekan Media



Diselenggarakan
bersamaan
dengan



Untuk info lebih lanjut!

Hubungi +62 21 57991465 atau email: registration@constructionindonesia.com

www.constructionindonesia.com/id/registrasi